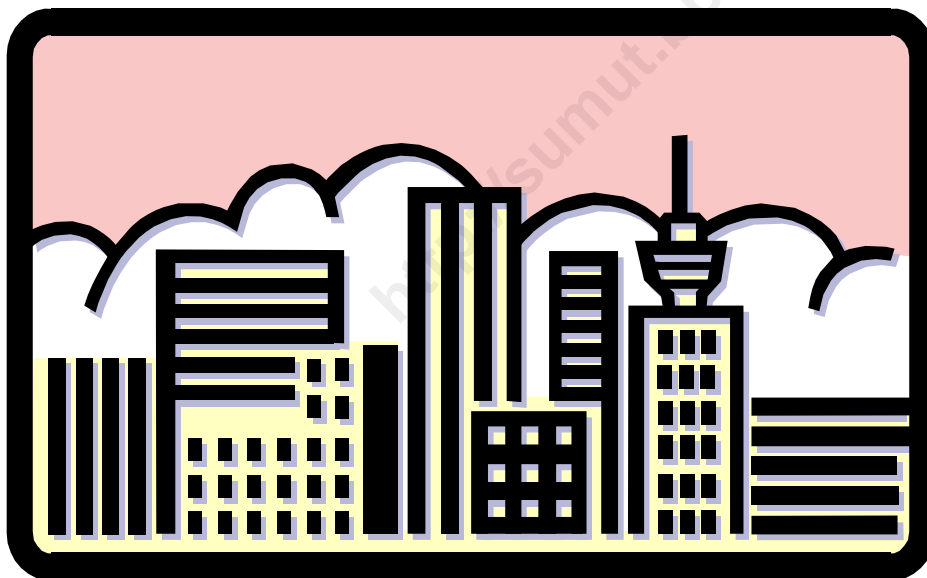




KATALOG BPS : 6104.12

STUDI KASUS PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2004



BPS

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA**

STUDI KASUS
PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI
PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2004



***STUDI KASUS PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2004***

Katalog BPS : 6104.12

Ukuran Buku : 28 X 21 cm

Jumlah Halaman : v + 84

Naskah : Bidang Statistik Produksi Seksi
Statistik Industri

Penanggung Jawab : H.M. Nasir Syarbaini, SE.

Penyunting : Drs. Erwin Said

Penulis : Ir. Ida Suswati, M.Si
Puguh Setiandono, SSit

Gambar Kulit : Bidang Statistik Produksi Seksi
Statistik Industri

Diterbitkan Oleh : Badan Pusat Statistik Provinsi
Sumatera Utara

Sumber Dana : APBD Propinsi Sumatera Utara
Tahun 2005

KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik Propinsi Sumatera Utara setiap tahun terus berupaya untuk menyajikan berbagai informasi statistik yang sangat dibutuhkan oleh berbagai kalangan pengguna data. Salah satu informasi statistik yang disajikan pada tahun ini adalah Publikasi Studi Kasus Permasalahan Sektor Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 yang menyajikan gambaran permasalahan yang dihadapi sektor industri dan sejauh mana andil yang diberikan terhadap perekonomian Sumatera Utara.

Publikasi ini dapat juga digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat kemajuan, serta yang menyebabkan perusahaan industri menjadi tutup atau berubah skala menjadi kecil di Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya kepada para pengusaha yang menjadi responden dalam survei-survei BPS serta kepada instansi pemerintah lainnya yang telah menjadi sumber untuk mendapatkan data dalam penulisan publikasi ini.

Harapan kami semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para pengguna data. Saran dan kritik dari para pengguna data sangat diharapkan guna perbaikan di masa yang akan datang.

Medan, Desember 2005

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA,

H.M. NASIR SYARBAINI, SE.
NIP. 340003769.-

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR TABEL LAMPIRAN	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	3
1.3. Ruang Lingkup Penulisan	4
1.4. Metodologi	4
1.5. Konsep dan Definisi	4
BAB 2. LANDASAN TEORI	7
2.1. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur	7
2.2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non Migas	14
2.3. Nilai Tambah Bruto	25
2.4. Tingkat Efisiensi	26
2.5. Produktivitas	27
2.6. Tenaga Kerja	28
BAB 3. GAMBARAN UMUM	29
3.1. Kondisi Wilayah	29
3.2. Penduduk dan Tenaga Kerja	30
3.3. Potensi Wilayah	33
3.3.1. Potensi Pertanian	33
3.3.1.1. Tanaman Bahan Makanan	34
3.3.1.2. Perkebunan	38
3.3.1.3. Peternakan	42

3.3.1.4. Perikanan	44
3.3.2. Perdagangan Luar Negeri	44
3.3.2.1. Ekspor	45
3.3.2.2. Impor	48
3.4. Sarana dan Prasarana	48
3.4.1. Angkutan Darat	48
3.4.2. Angkutan Laut	50
3.4.3. Angkutan Udara	52
BAB 4. PERAN DAN NILAI TAMBAH	55
4.1. Umum	55
4.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan	57
4.3. Persebaran Jumlah Perusahaan	60
4.4. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja	61
4.5. Nilai Output	62
4.6. Biaya Input	64
4.7. Nilai Tambah (Menurut Harga Pasar)	65
4.5. Produktivitas	67
4.6. Efisiensi	69
BAB 5. PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI	72
5.1. Peranan Industri Pengolahan Sumatera Utara	72
5.2. Permasalahan Sektor Industri	73
BAB 6. KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan	82
6.2. S a r a n	83

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Nilai PDRB Sektor Pertanian di Sumatera Utara menurut Sub Sektor Tahun 2000-2004 (Milyar Rupiah)	34
Tabel 3.2. Luas Panen dan Produksi Padi Sumatera Utara Tahun 2000-2004	35
Tabel 3.3. Produksi Beberapa Jenis Tanaman Bahan Makanan di Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)	37
Tabel 3.4. Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Rakyat di Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)	40
Tabel 3.5. Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Besar Milik Pemerintah di Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)	41
Tabel 3.6. Populasi Ternak Besar, Kecil, dan Unggas di Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ekor)	43
Tabel 3.7. Produksi Ikan Sumatera Utara Menurut Asal Tangkapan Tahun 2000-2004 (Ton)	44
Tabel 3.8. Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara Tahun 2000-2004	45
Tabel 3.9. Nilai Ekspor Sumatera Utara menurut Komoditi Tahun 2000-2004 (Juta US\$)	46
Tabel 3.10. Nilai Ekspor Sumatera Utara menurut Negara Tujuan Tahun 2000-2004 (Ribu US\$)	47
Tabel 3.11. Nilai Impor Sumatera Utara menurut Kelompok Barang Ekonomi Tahun 2000-2004 (Ribu US\$)	48
Tabel 3.12. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Panjang Jalan Tahun 2000-2004	49
Tabel 3.13. Lalu Lintas Laut Antar Negara pada Pelabuhan di Sumatera Utara Tahun 2000-2004	51

	Halaman
Tabel 4.1. Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 1993, Tahun 2000-2004	55
Tabel 4.2. Persentase PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha Atas dasar Harga Konstan 1993, Tahun 2000-2004	56
Tabel 4.3. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004	58
Tabel 4.4. Perbandingan Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara dan Indonesia, Tahun 1996-2003	59
Tabel 4.5. Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Menurut Kabupaten Kota, Tahun 1996-2004	60
Tabel 4.6. Banyaknya Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004	62
Tabel 4.7. Total Output Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004 (Milyar Rupiah)	63
Tabel 4.8. Biaya Input Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004 (Milyar Rupiah)	65
Tabel 4.9. Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004 (Milyar rupiah)	67
Tabel 4.10. Produktivitas Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)	68
Tabel 4.11. Efisiensi Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004	70

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bangsa Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya keluar dari krisis multi dimensi yang dimulai sejak pertengahan tahun 1997. Meski secara umum pada tahun 2004 beberapa indikator ekonomi makro di Indonesia khususnya di Sumatera Utara seperti laju inflasi, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan luar negeri semakin membaik namun kondisi dan keberadaan perusahaan industri besar dan sedang dari tahun ke tahun jumlahnya cenderung menurun.

Berdasarkan hasil survai industri besar dan sedang tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, pada tahun 1997 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1088 perusahaan. Dengan terjadinya krisis, jumlah perusahaan industri besar dan sedang mengalami penurunan menjadi 929 perusahaan pada tahun 2004 atau menurun 14,61 persen. Penurunan disebabkan adanya perusahaan tutup maupun berubah skala dari besar dan sedang menjadi kecil (pengurangan tenaga kerja).

Dampak langsung dari penurunan jumlah perusahaan adalah meningkatnya jumlah pengangguran, dimana pada tahun 2004 jumlah pengangguran terbuka yaitu penduduk 15 tahun ke atas yang mencari pekerjaan mencapai 433.942 orang, atau sekitar 8,36 persen dari jumlah angkatan kerja. Jumlah pengangguran terbuka ini meningkat dibanding tahun 2003 yang hanya mencapai 404.117 orang atau 7,71 persen. Sementara kesempatan kerja yang tercipta belum seiring dengan penambahan jumlah pencari kerja, sehingga pengangguran masih terus bertambah.

Selain menghadapi krisis yang belum juga berakhir, tantangan yang lebih besar yakni globalisasi sudah terbentang. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menjadikan dunia sebagai satu pasar yang terbuka. Pasar dalam negeri menjadi bagian dari pasar dunia yang terbuka tersebut. Dalam pasar yang demikian, negara-negara produsen atau perusahaan-perusahaan berlomba memasarkan produknya. Mereka menawarkan berbagai keunggulan dan kelebihan yang dimiliki. Persaingan sengit pun tak terhindarkan, bukan cuma barang tapi juga modal dan jasa.

Diawali dengan mulai diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas Asean atau AFTA (*Asean Free Trade Area*) sejak 1 Januari 2003, ada keraguan di benak pengusaha nasional dalam menghadapinya. Bahkan bukan sekedar ragu tapi cenderung pesimistik. Benarkah industri dalam negeri memang siap menghadapi AFTA?.

Mengingat globalisasi dan pasar bebas adalah fenomena yang niscaya, tak terhindarkan, suka atau tidak suka, maka salah satu kunci keberhasilan pembangunan ekonomi nasional adalah memperkuat dunia usaha, dalam hal ini dengan memajukan daya saing. Jika dunia usaha tumbuh, maka lapangan kerja dengan otomatis akan tersedia.

Dalam upaya pembangunan ekonomi, sektor industri menjadi primadona karena sektor industri dianggap memiliki nilai tambah dan produktivitas yang lebih baik dibandingkan sektor lainnya, bahkan telah menjadi pilihan sebagai “lokomotif” pembangunan ekonomi baik di negara maju maupun negara berkembang.

Sangat disayangkan bila kondisi dan keberadaan industri besar dan sedang Provinsi Sumatera Utara tak kunjung membaik. Strategi yang jitu sangat dibutuhkan terutama untuk mencapai salah satu sasaran peningkatan daya saing industri manufaktur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yaitu sektor industri manufaktur (non migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun.

Untuk mengkaji permasalahan yang dihadapi sektor industri, **Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara** bekerja sama dengan **Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara** mencoba menganalisa faktor-faktor apa yang menghambat kemajuan dan menyebabkan perusahaan industri besar dan sedang di Sumatera Utara menjadi tutup atau berubah skala menjadi kecil, yang dipublikasikan dengan judul “**Studi Kasus Permasalahan Sektor Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004**”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan “**Studi Kasus Permasalahan Sektor Industri Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004**” adalah untuk memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi sektor industri di Sumatera Utara, sejauh mana andil yang diberikan terhadap perekonomian Sumatera Utara dan tingkat produktivitas industri besar dan sedang di Sumatera Utara.

Melalui indikator ini diharapkan pengambil keputusan dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu diambil untuk peningkatan realisasi kapasitas produksi

(utilisasi kapasitas) dan daya saing sektor industri khususnya industri besar dan sedang.

1.3. Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan ini, karena keterbatasan data maka yang dianalisa umumnya kondisi perusahaan industri golongan besar dan sedang. Cakupan data yang dipergunakan bersumber dari hasil pencacahan terhadap semua perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Propinsi Sumatera Utara. Pengklasifikasian perusahaan industri besar dan sedang diklasifikasikan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang ada pada perusahaan tersebut. Dikatakan industri besar dan sedang bila bertenaga kerja \geq 20 orang.

1.4. Metodologi

Penelitian dalam penyusunan publikasi ini dilakukan terhadap perusahaan industri besar dan sedang dengan cara sensus/pencacahan lengkap (complete enumeration), artinya semua perusahaan yang termasuk dalam klasifikasi industri besar dan sedang diteliti keberadaannya. Untuk menggali informasi lebih dalam khusus Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan yang mempunyai jumlah perusahaan paling banyak di Sumatera Utara dipilih secara purposive sebagai Studi Kasus Survei Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sektor Pengolahan yang Tutup di Sumatera Utara tahun 2004.

1.5. Konsep dan definisi

a. Industri Pengolahan

Industri pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah barang jadi/setengah jadi, mengubah barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih nilainya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan jasa industri dan pekerja perakitan (assembling).

b. Perusahaan Industri

Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggungjawab atas resiko usaha tersebut.

Penggolongan sektor industri ini semata-mata hanya didasarkan kepada banyaknya tenaga kerja yang bekerja di perusahaan industri tersebut tanpa memperhatikan apakah perusahaan ini menggunakan tenaga mesin atau tidak serta tanpa memperhatikan besarnya modal perusahaan tersebut.

Industri pengolahan digolongkan menjadi empat golongan yang didasarkan pada banyaknya pekerja, yaitu :

01. Industri besar, mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih
02. Industri sedang, mempunyai tenaga kerja antara 20 – 99 orang
03. Industri kecil, mempunyai tenaga kerja antara 5 – 19 orang

04. Industri kerajinan rumahtangga, mempunyai tenaga kerja antara 1 – 4 orang.

c. Pekerja

01. Pekerja adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha.

02. Pekerja dibayar adalah semua pekerja yang biasanya bekerja di perusahaan/ usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan lainnya, baik berupa uang maupun barang, pada unit kegiatan ekonomi tersebut.

03. Pekerja tidak dibayar meliputi pekerja pemilik (yang tidak dibayar) atau pekerja keluarga yang biasanya aktif dalam kegiatan perusahaan/usaha tetapi tidak mendapat upah dan gaji.

d. Referensi Waktu Data

Untuk data statistik industri besar dan sedang digunakan keadaan tahun 2003 dimana pengumpulan datanya dilakukan dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2004.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur

Terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 dan terus berlanjut menjadi krisis ekonomi berdampak negatif terhadap hampir semua sektor ekonomi tidak terkecuali sektor industri. Salah satu dampak negatif yang mengkhawatirkan adalah penurunan daya saing. Masalah daya saing menjadi penting terutama dalam menghadapi pelaksanaan perdagangan bebas ASEAN (AFTA) 2003 dan persiapan menghadapi perdagangan bebas negara-negara maju anggota APEC pada tahun 2010 dan seluruh anggota APEC pada tahun 2020.

Untuk mengukur peringkat daya saing sektor industri manufaktur *United Nations Industrial Development Organization* (UNIDO) mengembangkan indikator *Competitiveness Industrial Performance* (CIP) yang diterapkan pada 93 negara dalam periode 1980-2000. Dalam *Industrial Development Report 2004*, ukuran indikator CIP tersebut terdiri dari empat variabel utama, yaitu: (a) nilai tambah industri manufaktur per kapita, (b) ekspor industri manufaktur per kapita, (c) intensitas industrialisasi yang diukur dari kontribusi industri manufaktur pada PDB dan kontribusi industri manufaktur berteknologi menengah dan tinggi pada sektor industri manufaktur, dan (d) kualitas ekspor yang diukur dari kontribusi ekspor manufaktur dalam total ekspor dan kontribusi manufaktur berteknologi menengah dan tinggi dalam nilai ekspor industri manufaktur.

Dalam periode 1980-2000 kinerja industri manufaktur Indonesia dikategorikan sebagai salah satu pemenang utama (*main winners*) bersama beberapa

negara berkembang lain yang kebanyakan berasal dari kawasan Asia Timur. Dalam dua dekade tersebut, kawasan Asia Timur memang merupakan kawasan yang disebut sebagai mesin pertumbuhan bagi peningkatan peran negara berkembang dalam pengembangan industri manufaktur. Diantara kinerja negara-negara berkembang tersebut, Cina merupakan pemenang nomor satu. Sementara itu, peringkat kinerja industri manufaktur Indonesia memang meningkat dari urutan ke-75 pada tahun 1980, menjadi urutan ke-54 pada tahun 1990, dan urutan ke-38 pada tahun 2000. Namun bila dibandingkan dengan beberapa negara pesaing utama di Asia Timur (termasuk ASEAN), peningkatan posisi Indonesia relatif kurang baik.

Kurangnya daya saing tersebut merupakan akibat dari berbagai faktor. Menurut tolok ukur *World Economic Forum* (WEF), diidentifikasi lima faktor penting yang menonjol yaitu tiga faktor pada tatanan makro dan dua faktor pada tatanan mikro. Pada tatanan makro, yaitu: (a) tidak kondusifnya kondisi ekonomi makro, (b) buruknya kualitas kelembagaan publik dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator dan pusat pelayanan, dan (c) lemahnya kebijakan pengembangan teknologi dalam memfasilitasi kebutuhan peningkatan produktivitas. Pada tatanan mikro yaitu: (a) rendahnya efisiensi usaha pada tingkat operasionalisasi perusahaan, dan (b) lemahnya iklim persaingan usaha.

Menurut catatan *International Institute for Management Development* (IMD), rendahnya kondisi daya saing Indonesia disebabkan buruknya kinerja perekonomian nasional dalam empat hal pokok, yaitu: (a) buruknya kinerja perekonomian nasional yang tercermin dalam kinerjanya di perdagangan internasional, investasi, ketenagakerjaan, dan stabilitas harga, (b) buruknya efisiensi kelembagaan

pemerintahan dalam mengembangkan kebijakan pengelolaan keuangan negara dan kebijakan fiskal, pengembangan berbagai peraturan dan perundangan untuk iklim usaha kondusif, lemahnya koordinasi akibat kerangka publik yang masih banyak tumpang tindih, dan kompleksitas struktur sosialnya, (c) lemahnya efisiensi usaha dalam mendorong peningkatan produksi dan inovasi secara bertanggung jawab yang tercermin dari tingkat produktivitasnya yang rendah, serta praktik dan nilai manajerial yang relatif belum profesional, dan (d) keterbatasan di dalam infrastruktur, baik infrastruktur fisik, teknologi dan infrastruktur dasar yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan kesehatan.

Meskipun masalah penurunan daya saing berawal sebelum krisis tahun 1997, perkembangan industri sangat memburuk setelah krisis tahun 1997. Banyak pengamat mengindikasikan terjadinya *deindustrialisasi*. Gejala ini ditunjukkan dengan mengamati perkembangan tingkat realisasi kapasitas produksi (utilisasi kapasitas), jumlah perusahaan dan indeks produksi. Pemanfaatan kapasitas terpasang industri manufaktur tahun 2002 hanya berkisar 60 persen, menurun jauh dibanding dengan kondisi sebelum krisis yang berkisar 80 persen. Dalam periode tahun 1996 – 2002, jumlah perusahaan industri berskala besar dan sedang menurun hampir 1800 unit usaha atau sekitar 8 persen dari 22.997 unit usaha yang ada di Indonesia tahun 1996. Sementara itu, indeks produksi industri pengolahan berskala besar dan sedang juga mengalami penurunan sangat signifikan, sekitar 26 persen, dari 126,54 persen pada tahun 1997 menjadi 100,29 persen pada tahun 2002.

Selain penurunan daya saing, beberapa permasalahan spesifik di sektor industri manufaktur Indonesia adalah sebagai berikut:

1. **KKN dan layanan umum yang buruk** mengakibatkan tingginya biaya *overhead*. Menurut kajian Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), pengeluaran untuk berbagai pungutan dan untuk biaya buruknya layanan umum menambah biaya *overhead* sekitar 8,7 persen – 11,2 persen.
2. **Cost of money** yang relatif tinggi, tercermin dari suku bunga yang saat ini sangat tinggi. Pengusaha dalam negeri yang mengandalkan perbankan dalam negeri akan kalah bersaing dengan perusahaan yang modal kerjanya dari luar negeri dengan bunga sekitar 4-6 persen.
3. **Administrasi perpajakan yang belum optimal**. Pengusaha menganggap *overhead* administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk industri ekspor sangat tidak efisien. Hal tersebut mengakibatkan daya saing produk ekspor menjadi berkurang karena ketidakefisiensian tersebut dibebankan ke harga jualnya. Selain itu, hal tersebut juga tidak kondusif untuk integrasi antar industri terkait untuk pengadaan bahan antaranya. Pada umumnya mereka memilih untuk impor bahan baku atau produk antara karena sejak awal tidak terkena PPN.
4. **Kandungan impor sangat tinggi**. Nilai impor bahan baku, bahan antara (*intermediate*), dan komponen untuk seluruh industri meningkat dari 28 persen pada tahun 1993 menjadi 30 persen pada tahun 2002. Khusus untuk industri tekstil, kimia dan logam dasar nilai tersebut mencapai 30-40 persen, sedangkan untuk industri mesin, elektronik dan barang-barang logam mencapai lebih dari 60 persen. Tingginya kandungan impor ini mengakibatkan rentannya biaya produksi

terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah dan kecilnya nilai tambah yang mengalir pada perekonomian domestik.

5. **Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi.** Nilai tambah industri nasional relatif rendah, hal ini menunjukkan bahwa karakteristik industri manufaktur masih tipe “tukang jahit”, meskipun dalam komposisi ekspor mulai terjadi peningkatan proporsi produk ekspor berteknologi menengah dan tinggi. Kehadiran *foreign direct investment* (FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis untuk alih teknologi belum dapat dimanfaatkan.
6. **Kualitas SDM relatif rendah.** Dari hampir 4,2 juta orang tenaga kerja industri dalam 22.894 perusahaan pada tahun 1996, hanya 2 persen berpendidikan sarjana, sekitar 0,1 persen berpendidikan master, dan 0,005 persen (hanya 225 orang) berpendidikan doktor. Sementara itu, intensitas pelatihan yang dilaksanakan oleh industri belum juga menggembirakan. Hasil survei tahun 1990-an menunjukkan hanya 18,9 persen perusahaan di Indonesia melaksanakannya. Di Malaysia, kegiatan yang sama dilakukan oleh hampir 84 persen perusahaan-perusahaannya. SDM dengan kualitas ini akan sulit diharapkan menghasilkan peningkatan produktivitas apalagi inovasi-inovasi yang bermutu untuk teknologi produksinya.
7. **Iklm persaingan yang kurang sehat.** Banyak sub-sektor industri yang beroperasi dalam kondisi mendekati “monopoli”. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya indeks konsentrasi untuk dua perusahaan (CR2). Pada tahun 2002, lebih dari 50 persen kelompok usaha industri memiliki angka 0,50 dan banyak kelompok industri dengan angka konsentrasi yang makin besar. Beberapa contoh

adalah pada industri tepung terigu, rokok putih, dan kendaraan roda dua. Keadaan ini menyebabkan insentif untuk penurunan biaya produksi menjadi kecil.

8. Struktur industri masih lemah. Sebagai ilustrasi, di industri kendaraan bermotor pada tahun 1997 jumlah produser komponen mencapai 155 perusahaan. Namun hampir semua produsen komponen ini merupakan pemasok lapis pertama. Hal ini menunjukkan lemahnya kedalaman struktur industri nasional otomotif. Sebagai perbandingan, pada tahun yang sama di Jepang ada 350 pemasok lapis pertama, 2.000 pemasok lapis kedua, dan 10.000 pemasok lapis ketiga. Artinya industri nasional sangat terintegrasi secara vertikal.

9. Peranan industri kecil dan menengah (termasuk RT) masih minim. Industri berskala menengah (20-99 orang tenaga kerja), berskala kecil (5-19 orang tenaga kerja), dan industri rumah tangga (1-4 orang tenaga kerja) mempekerjakan dua pertiga tenaga kerja manufaktur di Indonesia. Namun demikian, segmen industri ini menyumbang hanya 5-6 persen dari total nilai tambah manufaktur. Industri kecil dan menengah terkonsentrasi di sub sektor makanan dan kayu. Industri-industri pada segmen ini umumnya melayani konsumen akhir atau memproduksi komponen untuk “*after sales marker*”, dengan segmen kelas terendah. Sangat sedikit yang memproduksi bahan baku dan atau barang *intermediate* serta memasoknya ke industri hilir. Dengan kondisi ini, industri kecil dan menengah di Indonesia belum berada dalam satu mata rantai pertambahan nilai dengan industri berskala besar.

10. Sebaran Industri yang terpusat di Pulau Jawa. Unit usaha industri merupakan pencipta kesejahteraan (*wealth*) terpenting melalui nilai tambah produk-produk

yang dihasilkan dan sekaligus mendistribusikannya ke khalayak melalui pekerjanya. Oleh karena itu distribusi dari segmen industri ini juga akan mencerminkan distribusi kesejahteraan yang terbentuk. Menurut data tahun 2002, dari 21,146 usaha industri berskala menengah dan besar, 17.118 atau 80 persen diantaranya berada di Pulau Jawa.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sasaran yang akan dicapai dalam peningkatan daya saing industri manufaktur adalah sebagai berikut :

1. Sektor industri manufaktur (non-migas) ditargetkan tumbuh dengan laju rata-rata 8,56 persen per tahun. Dengan tingkat operasi rata-rata hanya sekitar 60 persen pada tahun 2003, target peningkatan kapasitas utilisasi khususnya sub-sektor yang masih berdaya saing akan meningkat ke titik optimum yaitu sekitar 80 persen dalam dua sampai tiga tahun pertama, terutama untuk industri yang dinilai memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif.
2. Target penyerapan tenaga kerja dalam lima tahun mendatang adalah sekitar 500 ribu per tahun (termasuk industri pengolahan migas). Dengan kecenderungan penurunan penyerapan beberapa tahun belakangan ini, penyerapan tenaga kerja baru lebih banyak mengandalkan pada basis industri baru yang perlu dipacu pertumbuhannya. Sejalan dengan upaya revitalisasi pertanian dan perdesaan, langkah pengembangan untuk mewujudkan industrialisasi perdesaan menjadi sangat penting. Sedangkan bagi industri berskala menengah dan besar penyerapan tenaga kerja baru akan mengandalkan investasi baru. Diperkirakan

kebutuhan investasi untuk mengejar target penyerapan tenaga kerja di atas mencapai 40 sampai 50 triliun rupiah per tahun.

3. Terciptanya iklim usaha yang lebih kondusif baik bagi industri yang sudah ada maupun investasi baru dalam bentuk tersedianya layanan umum yang baik dan bersih dari KKN, sumber-sumber pendanaan yang terjangkau, dan kebijakan fiskal yang menunjang.
4. Peningkatan pangsa sektor industri manufaktur di pasar domestik, baik untuk bahan baku maupun produk akhir, sebagai cerminan daya saing sektor ini dalam menghadapi produk-produk impor.
5. Meningkatnya volume ekspor produk manufaktur dalam total ekspor nasional, terutama pada produk ekspor industri manufaktur yang daya saingnya masih potensial untuk ditingkatkan.
6. Meningkatnya proses alih teknologi dari *foreign direct investmen* (FDI) yang dicerminkan dari meningkatnya pemasokan bahan antara dari produk lokal.
7. Meningkatnya penerapan standardisasi produk industri manufaktur sebagai faktor penguat daya saing produk nasional.
8. Meningkatnya penyebaran sektor industri manufaktur ke luar Pulau Jawa, terutama industri pengolahan hasil sumberdaya alam.

2.2. Peningkatan Investasi dan Ekspor Non-Migas

Salah satu sebab utama dari lambatnya pemulihan ekonomi sejak krisis 1997 adalah buruknya kinerja investasi akibat sejumlah permasalahan yang mengganggu

pada setiap tahapan penyelenggaraannya. Keadaan tersebut menyebabkan lesunya kegairahan melakukan investasi, baik untuk perluasan usaha yang telah ada maupun untuk investasi baru. Masalah ini akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang selama ini lebih didorong oleh pertumbuhan konsumsi ketimbang investasi atau ekspor. Rendahnya investasi dalam beberapa tahun terakhir sejak krisis ekonomi juga telah mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dalam maupun luar negeri.

Situasi di atas diperparah dengan masih belum efisiennya fasilitasi perdagangan nasional yang berkaitan dengan aktivitas ekspor – impor. Biaya fasilitasi perdagangan meliputi seluruh komponen biaya transaksi langsung dan tidak langsung yang mempengaruhi kegiatan ekspor-impor (termasuk biaya untuk urusan perbankan dan asuransi, informasi bisnis, urusan bea cukai, biaya transportasi, dan administrasi pengadaan barang sesuai aturan pemerintah). Dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, efisiensi fasilitasi perdagangan nasional relatif rendah sehingga memperburuk posisi daya saing produk ekspor nasional.

Dalam tahun 1999-2003, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun, jauh di bawah tahun 1991-1996 yang tumbuh rata-rata sekitar 10,6 persen per tahun. Dengan lambatnya pemulihan investasi, peranan investasi berupa pembentukan modal tetap bruto terhadap PDB menurun dari 29,6 persen pada tahun 1997 menjadi 19,7 persen pada tahun 2003. Dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis, secara riil tingkat investasi pada tahun 2003 baru mencapai sekitar 69 persen dari volume investasi 1997 (harga konstan 1993). Sampai dengan triwulan III/2004, pembentukan modal tetap bruto mulai

tumbuh yaitu sebesar 11,3 persen. Meskipun demikian, peningkatannya masih sangat awal dan perlu didorong dengan mengatasi masalah-masalah pokok yang menghambat investasi.

Pengembangan investasi ke depan menghadapi tantangan eksternal yang tidak ringan. Salah satunya adalah kecenderungan berkurangnya arus masuk investasi global melalui FDI sejak sebelum tahun 2000. Sementara itu, daya tarik investasi pada beberapa negara Asia Timur pesaing Indonesia seperti antara lain RRC, Vietnam, Thailand, dan Malaysia justru meningkat. Oleh karena itu, lambannya respon terhadap penciptaan lingkungan usaha yang kondusif serta terhadap kebutuhan penyederhanaan berbagai perangkat peraturan dan formulasi sistem insentif di bidang investasi dikhawatirkan berimplikasi jangka menengah dan panjang untuk perkembangan ekonomi ke depan. Secara ringkas, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi adalah iklim investasi yang memburuk karena berbagai faktor sebagai berikut:

- 1. Prosedur perijinan investasi yang panjang dan mahal.** Berdasarkan studi Bank Dunia pada tahun 2004, bila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN, perijinan untuk memulai suatu usaha dari berbagai instansi baik pusat maupun daerah di Indonesia membutuhkan waktu yang lebih lama dengan 12 prosedur yang harus dilalui dengan waktu yang dibutuhkan selama 151 hari (sekitar 5 bulan) dan biaya yang diperlukan sebesar 131 persen dari *per capita income* (sekitar US\$ 1.163). Sementara itu untuk memulai usaha di Malaysia hanya melalui 9 prosedur dengan waktu yang dibutuhkan hanya 30 hari

dan biaya yang diperlukan hanya 25 persen dari *per capita income* (sekitar US\$ 945). Adapun untuk memulai usaha di Filipina dan Thailand hanya membutuhkan waktu masing-masing selama 50 hari dan 33 hari dengan biaya masing-masing sebesar 20 persen (sekitar US\$ 216) dan 7 persen (sekitar US\$ 160) dari *per capita income*. Prosedur yang panjang dan berbelit tidak hanya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi tetapi juga menghilangkan peluang usaha yang seharusnya dapat dimanfaatkan baik untuk kepentingan perusahaan maupun untuk kepentingan nasional seperti dalam bentuk penciptaan lapangan kerja.

2. **Rendahnya kepastian hukum.** Tercermin antara lain dari berlarutnya perumusan RUU Penanaman Modal dan lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan kinerja pengadilan niaga. Rendahnya kepastian hukum juga tercermin dari banyaknya tumpang tindih kebijakan antar pusat dan daerah dan antar sektor. Belum mantapnya pelaksanaan program desentralisasi mengakibatkan kesimpangsiuran kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam kebijakan investasi. Disamping itu juga terdapat keragaman yang besar dari kebijakan investasi antar daerah. Kesemuanya ini mengakibatkan ketidakjelasan kebijakan investasi nasional yang pada gilirannya akan menurunkan minat investasi.
3. **Lemahnya insentif investasi.** Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia relatif tertinggal dalam menyusun insentif investasi, termasuk insentif perpajakan, dalam menarik penanaman modal di Indonesia. Meskipun dengan tingkat pajak progresif yang diperkirakan relatif sama dengan negara-negara lain,

sistem perpajakan di Indonesia kurang memberi kelonggaran-kelonggaran perpajakan dalam upaya mendorong investasi.

- 4. Kualitas SDM rendah dan terbatasnya infrastruktur.** Kurang bergairahnya iklim investasi juga disebabkan oleh keterbatasan dari daya saing produksi (*supply side*) dan kapasitas dari sistem dan jaringan infrastruktur karena sebagian besar dalam keadaan rusak akibat krisis. Pengembangan manufaktur yang belum berbasis pada kemampuan penguasaan teknologi dan masih rendahnya kemampuan SDM tenaga kerjanya memiliki implikasi yang tidak ringan. Sementara itu, keterbatasan kapasitas infrastruktur berpengaruh pada peningkatan biaya distribusi yang pada gilirannya justru memperburuk daya saing produk-produknya.
- 5. Tidak adanya kebijakan yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari PMA.** Perkembangan globalisasi serta pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi membawa pengaruh besar di dalam liberalisasi investasi. Pesatnya perkembangan dominasi *transnational corporations* (TNCs) dapat dicermati dari perkembangannya dalam FDI. Bila pada tahun 1990 jumlah modal yang ditanamkan sebesar US\$ 1,7 triliun melibatkan 24 juta tenaga kerja diseluruh dunia, pada tahun 2001 jumlah modal yang ditanam meningkat empat kali lipat menjadi US\$ 6,6 triliun dan melibatkan pekerja 45 juta orang di seluruh dunia. Dengan kekuatannya dalam jaringan nilai tambah (*value added chain*) dari mulai R&D sampai pada logistik dan pemasaran, aktivitas TNCs banyak mendominasi pola perdagangan global, terutama jaringan ekspor-impor (baik produk antara maupun final) dari dan ke negara-negara berkembang.

Sejak krisis 1997, kinerja ekspor nasional masih belum maksimal. Sampai dengan 2003, kondisinya masih relatif stagnan di saat gairah perdagangan dunia justru membaik. Pertumbuhan ekspor hanya sekitar 3 persen, jauh lebih kecil dibandingkan saat sebelum krisis yang sekitar 16 persen. Beberapa komoditi yang dulunya menjadi andalan seperti minyak kelapa sawit, furniture, dan sepatu, justru mengalami penurunan tingkat pertumbuhan yang paling besar. Meskipun terdapat perubahan komposisi karena mulai bermunculan ekspor dengan kandungan teknologi lebih tinggi, kontribusinya terhadap keseluruhan ekspor masih sangat kecil. Secara total pangsa ekspor Indonesia memang masih sedikit meningkat di pasar dunia (dari 0,81 persen menjadi 0,84 persen), namun pangsa ekspor 30 komoditi utama (di luar minyak dan gas bumi) justru menurun karena ketatnya persaingan dengan negara-negara Asia lain yang struktur ekspornya mirip seperti Cina, Korea, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Terdapat delapan permasalahan pokok yang menyebabkan penurunan kinerja ekspor nasional, yaitu berkenaan dengan :

- 1. Biaya Ekonomi Tinggi.** Masih tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia usaha secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor. Banyak faktor penyebab yang antara lain adalah masih maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang, belum terjaminnya keamanan berusaha (belum berjalannya penegakan hukum), kurang efektifnya peraturan pemerintah (tidak konsistennya antara peraturan yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan).

- 2. Meningkatnya nilai tukar riil efektif rupiah.** Nilai tukar rupiah secara nominal memang mengalami depresiasi bila dibandingkan pada masa sebelum krisis (tahun 1997), namun nilai tukar efektif riilnya mengalami penguatan sebesar 80 persen dibandingkan pada masa sebelum krisis. Penguatan tersebut terutama terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi penguatan sebesar 21 persen. Nilai tukar efektif riil dibentuk oleh dua komponen yaitu nilai tukar nominal dan rasio harga relatif antara harga domestik dengan harga di negara mitra dagang. Meningkatnya nilai tukar efektif riil rupiah membuat produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal (kurang kompetitif) dibandingkan dengan produk yang sama dari negara pesaing.
- 3. Masih besarnya ketergantungan pasar ekspor pada tiga negara utama,** yaitu Amerika Serikat, Jepang dan Singapura. Dominasinya mencapai sekitar 42 persen dari total ekspor nasional dan kondisinya praktis tidak berubah selama lebih dari sepuluh tahun. Hal ini tentu kurang menguntungkan bagi upaya menjaga kesinambungan ekspor nasional ke depan. Dengan penghapusan penuh kuota tekstil dan produk tekstil (TPT) ke Amerika Serikat dan Eropa, menurut sekretariat WTO, pangsa pakaian jadi Indonesia di Amerika Serikat diperkirakan menurun dari 4 persen (USD 2.556,7 juta pada tahun 2003) menjadi 2 persen. Hal itu berarti nilai ekspor total akan memiliki potensi berkurang sekitar 1.280 juta US\$ (atau Rp.10,8 triliun) pertahun.
- 4. Keragaman ekspor yang masih rendah.** Dari data BPS 2003, kontribusi 20 produk ekspor terbesar di dalam total ekspor non migas (SITC 3 digit) sekitar 60,8 persen. Dari jumlah tersebut, kontribusi dari ekspor produk manufaktur

hanya sekitar 24 persen. Dari informasi yang sama dapat juga disimpulkan bahwa ketergantungan ekspor yang masih besar pada komoditi bernilai tambah rendah (ekspor non-manufaktur) yang umumnya memiliki elastisitas penggunaan rendah dan harganya cenderung sangat berfluktuatif.

5. **Meningkatnya hambatan non tarif.** Setidaknya dalam satu dekade terakhir kecenderungan meningkatnya hambatan non tarif yang awalnya ditandai dengan isu lingkungan seperti *ecolabelling* dan perlindungan terhadap spesies hewan tertentu, serta isu pekerja anak pada produk-produk pertanian dan perikanan. Bahkan saat ini, dalam rangka pelaksanaan *Cargo Inspection Security*, sejak serangan WTC 2001, Amerika menerapkan *war risk surcharge* atas impornya dari Indonesia mulai Desember 2002 lalu. Muatan *cargo* 20 kaki dikenakan biaya 500 US\$, sedangkan untuk *cargo* 40 kaki mencapai 1.000 US\$. Sementara itu, untuk alasan yang serupa, kenaikan tarif per peti kemas ukuran 20-40 kaki tujuan negara-negara Eropa mencapai maksimal 600 US\$. Disamping itu, terdapat kecenderungan meningkatnya potensi kerugian ekspor akibat penerapan peraturan/standar yang menyebabkan ketidakberterimaan (*rejection*) bagi beberapa produk ekspor seperti *Automatic Detention* (HACCP) terhadap kakao (akibat terkontaminasi serangga dan infeksi jamur) dan CPO serta *Holding Order* terhadap produk makanan dan minuman. Setidaknya potensi kerugian diperkirakan mencapai 250 juta US\$ per tahun.
6. **Belum optimalnya pemberian insentif dan fasilitas,** terutama kepada eksportir kecil dan menengah. Terbatasnya kemampuan SDM dan kecilnya akses mereka kepada informasi pasar dan sumber pembiayaan pada UKM ekspor masih tetap

merupakan problema pokok UKM yang sangat memberatkan di dalam menghasilkan produk yang memenuhi kuantitas pemesanan dan kualitas yang konsisten dengan standar teknisnya.

7. **Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur.** Masalah infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan jaringan komunikasi merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya ekspor. Meskipun tarif pelabuhan di Indonesia relatif rendah, namun pengapalan kontainer dari Indonesia dilakukan melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini disebabkan tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia relatif rendah.
8. **Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor.** Dewasa ini jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar (pengumpul, eceran dan grosir) serta maraknya berbagai pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat penyelenggaraan otonomi. Masalah ini menyebabkan berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk dimanfaatkan sebagai bahan antara (*intermediate goods*) karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor. Masalah ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan untuk peningkatan volume produksinya. Perbaikan dalam sistem koleksi dan distribusi (atau jaringan perdagangan dalam negeri), selain

bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk ekspor, juga akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena mendorong integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang terkait. Lebih jauh lagi, perbaikan sistem akan memiliki kehandalan di dalam mendorong perwujudan stabilitas harga serta bermanfaat untuk pengamatan dini dan akurat terhadap misalnya kemungkinan serbuan produk-produk impor tertentu.

Dengan permasalahan-permasalahan di atas, penciptaan iklim investasi yang mendukung peningkatan daya saing Indonesia (baik di sektor barang maupun jasa-jasa) menjadi tantangan yang mendesak ke depan. Dengan stabilitas ekonomi dan politik yang terjaga, upaya tersebut akan memberi perluasan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan devisa, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu, prioritas diletakkan pada perkuatan upaya penegakan hukum demi terciptanya kepastian usaha serta pengembangan kapasitas kelembagaan pelayanan publik terkait untuk menjawab tuntutan kebutuhan dunia usaha. Komitmen yang kuat dari pemerintah di segala tingkatan akan menjadi faktor penentu utama.

Sasaran yang hendak dicapai dalam upaya meningkatkan investasi dan ekspor non-migas yang tertuang dalam RPJM adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi biaya tinggi. Reformasi dimaksud mencakup upaya untuk menuntaskan sinkronisasi sekaligus deregulasi peraturan antar sektor dan antara pusat dengan

daerah serta peningkatan kapasitas kelembagaan untuk implementasi penyederhanaan prosedur perijinan untuk *start up* bisnis, penyempurnaan sistem perpajakan dan kepabeanan, penegakan hukum untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban berusaha.

2. Peningkatan efisiensi pelayanan ekspor-impor kepelabuhanan, kepabeanan, dan administrasi (verifikasi dan restitusi) perpajakan ke tingkatan efisiensi di negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam tiga tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.
3. Pemangkasan prosedur perijinan *start up* dan operasi bisnis ke tingkatan efisiensi negara-negara tetangga yang maju perekonomiannya di lingkungan ASEAN. Dalam tiga tahun pertama, diharapkan setengahnya telah tercapai.
4. Meningkatnya investasi secara bertahap sehingga peranannya terhadap Produk Nasional Bruto meningkat dari 20,5 persen pada tahun 2004 menjadi 27,4 persen pada tahun 2009 dengan penyebaran yang makin banyak pada kawasan-kawasan di luar Jawa, terutama Kawasan Timur Indonesia
5. Meningkatnya pertumbuhan ekspor secara bertahap dari sekitar 5,2 persen pada tahun 2005 menjadi sekitar 9,8 persen pada tahun 2009 dengan komposisi produk yang lebih beragam dan kandungan teknologi yang semakin tinggi.
6. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi nasional, tertib niaga dan kepastian berusaha untuk mewujudkan perdagangan dalam negeri yang kondusif dan dinamis.

2.3. Nilai Tambah Bruto

Untuk melihat besarnya nilai tambah yang dihasilkan oleh suatu perusahaan/usaha dapat dilihat dengan cara mengurangkan nilai output yang dihasilkan oleh perusahaan/usaha tersebut terhadap nilai input (biaya antara) yang dikeluarkan oleh perusahaan/usaha. Secara matematik nilai tambah bruto (NTB) dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NTB} = \text{Nilai Output} - \text{Nilai Input}$$

Dimana :

Nilai Output = Nilai produksi dari barang yang dihasilkan + pendapatan /penerimaan lain (pendapatan dari jasa industri, keuntungan penjualan barang yang tidak diproses, penerimaan jasa-jasa non industri lainnya dan penerimaan dari penjualan limbah/sampah produksi, misalnya sisa potongan kayu, kain, karung bekas dan sebagainya) + nilai stok barang setengah jadi (dinilai sesuai dengan nilai bahan baku ditambah nilai pekerjaan yang dilakukan) + tenaga listrik yang dijual.

Nilai Input = Nilai pengeluaran untuk pembelian bahan bakar dan pelumas untuk proses produksi + nilai pembelian bahan baku dan bahan penolong + pengeluaran rutin lainnya seperti; pengeluaran untuk sewa atau kontrak gedung, mesin serta alat-alat, pengeluaran untuk pengadaan kemasan, suku cadang dan alat tulis, jasa

industri, ongkos pemeliharaan kecil barang modal, derma dan sejenisnya, pengembangan sumber daya manusia, riset dan pengembangan produk dan proses dan lainnya + pengeluaran untuk tenaga listrik yang dibeli baik dari PLN maupun Non PLN. Tidak termasuk di dalamnya upah dan gaji, pajak tak langsung dan bunga atas pinjaman.

2.4. Tingkat Efisiensi

Pada umumnya pendirian suatu perusahaan/usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Untuk mencapai tujuan tersebut salah satu usaha diupayakan dengan mencapai tingkat efisiensi yang paling rendah.

Yang dimaksud dengan tingkat efisiensi adalah suatu perbandingan atau rasio antara tindakan yang dilakukan dengan hasil yang diperoleh (output). Dengan mudah dapat dirumuskan bahwa efisiensi (E) adalah perbandingan antara faktor-faktor ekonomi yang dipergunakan (I) dengan hasil yang terjadi (O). Dapat pula diartikan sebagai suatu pengertian yang melukiskan rasio antara usaha dengan hasil usaha itu.

Efisiensi secara rumus dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$E = \frac{I}{O}$$

Dimana;

- E = Tingkat efisiensi
- I = Nilai Input
- O = Nilai Output

Bila diperhatikan, yang dimaksud input dalam rumusan di atas sebenarnya adalah biaya antara (konsep pendapatan nasional). Perbandingan itu dapat ditinjau dari:

- | Sudut usaha, I, suatu pekerjaan adalah efisien seandainya suatu hasil tertentu dapat dihasilkan oleh usaha yang minimal.
- | Sudut hasil, O, suatu pekerjaan dapat dikatakan efisiensi seandainya dengan usaha tertentu bisa diperoleh hasil yang maksimal.

2. 5. Produktivitas

Yang dimaksud produktivitas dalam pembahasan buku ini adalah produktivitas tenaga kerja. Penggunaan ukuran produktivitas ini dianggap mewakili produktivitas perusahaan/usaha secara keseluruhan.

Konsep produktivitas yang sering digunakan oleh para ahli biasanya membandingkan jumlah tenaga kerja dengan nilai tambah atau dengan nilai output. Masing-masing mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Dalam analisis selanjutnya rasio yang digunakan adalah perbandingan terhadap nilai tambah menurut harga pasar.

$$P = \frac{NTB}{TK}$$

Dimana;

- P = Produktivitas tenaga kerja ditinjau dari sisi nilai tambah
- NTB = Nilai Tambah Menurut Harga Pasar
- TK = Jumlah tenaga kerja

2.6. Tenaga Kerja

Di Indonesia pengertian tenaga kerja yang sering digunakan adalah tenaga kerja yang mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, mencari pekerjaan dan yang melakukan kegiatan lain, seperti : sekolah dan mengurus rumahtangga. Tiga golongan yang disebut terakhir walupun sedang tidak bekerja, mereka dianggap secara fisik dan sewaktu-waktu dapat bekerja.

Secara praktis pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda-beda. India menggunakan batas umur 14 sampai dengan 60 tahun, Amerika Serikat menggunakan batasan umur 10 tahun ke atas tanpa batasan umur maksimum.

Penggunaan tenaga kerja yang tidak mengenal batas umur tersebut pada kenyataannya anak-anak dibawah umur 10 tahun juga banyak yang dipekerjakan. Beranjak dari kenyataan ini, maka konsep yang digunakan dalam Survei Industri Besar dan Sedang yang dilakukan Badan Pusat Statistik, tentang tenaga kerja/pekerja dalam perusahaan industri adalah semua orang yang biasanya bekerja di perusahaan/usaha dengan mendapat upah/gaji dan tunjangan-tunjangan lain, baik berupa uang ataupun barang, serta pekerja tidak dibayar, seperti: pemilik dan pekerja keluarga. (**Lihat konsep dan definisi**).

BAB III. GAMBARAN UMUM

3.1. Kondisi Wilayah

Luas daratan Propinsi Sumatera Utara adalah 71.680 Km², sebagian besar berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, Kepulauan Batu-batu serta beberapa pulau kecil baik di bagian barat maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera. Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi dalam tiga kelompok wilayah yaitu Pantai Barat, Dataran Tinggi dan Pantai Timur.

Propinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak pada garis 1⁰-4⁰ Lintang Utara dan 98⁰ -100⁰ Bujur Timur. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, sebelah Timur dengan Selat Malaka, sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Riau dan Sumatera Barat dan di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Karena terletak dekat garis khatulistiwa, Propinsi Sumatera Utara tergolong daerah beriklim tropis. Ketinggian permukaan daratan Propinsi Sumatera Utara sangat bervariasi, sebagian daerahnya datar, hanya beberapa meter di atas permukaan laut, beriklim cukup panas bisa mencapai 31,8⁰C, sebagian daerah berbukit dengan kemiringan yang landai, beriklim sedang dan sebagian lagi berada pada daerah ketinggian dengan suhu minimal mencapai 14,2⁰C.

Sebagaimana Propinsi lainnya di Indonesia, Propinsi Sumatera Utara mempunyai musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi

pada bulan Juni sampai dengan September dan musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan Maret, diantara kedua musim itu diselingi oleh musim pancaroba.

3.2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Sumatera Utara merupakan Propinsi keempat yang terbesar jumlah penduduknya di Indonesia setelah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menurut hasil pencacahan lengkap Sensus penduduk (SP) 1990 penduduk Sumatera Utara keadaan tanggal 31 Oktober 1990 (hari sensus) berjumlah 10,26 juta jiwa, dan dari hasil SP2000, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,51 juta jiwa. Pada bulan April tahun 2003 dilakukan Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Dari hasil pendaftaran tersebut diperoleh jumlah penduduk sebesar 11.890.399 jiwa. Selanjutnya dari hasil estimasi jumlah penduduk keadaan Juni 2004 diperkirakan sebesar 12.123.360 jiwa. Kepadatan penduduk Sumatera Utara tahun 1990 adalah 143 jiwa per km² dan tahun 2004 meningkat menjadi 169 jiwa per km². Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara selama kurun waktu tahun 1990-2000 adalah 1,20 persen per tahun, dan pada tahun 2000-2003 menjadi 1,14 persen per tahun.

Penduduk perempuan di Sumatera Utara sedikit lebih banyak dari laki-laki. Pada tahun 2004 penduduk Sumatera Utara terdiri dari 6.064.084 jiwa penduduk perempuan dan 6.059.276 jiwa penduduk laki-laki. Dengan demikian sex ratio penduduk Sumatera Utara sebesar 99,92 persen. Penduduk Sumatera Utara masih

lebih banyak tinggal di daerah perdesaan dari pada daerah perkotaan. Jumlah penduduk Sumatera Utara yang tinggal di perdesaan adalah 6,75 juta jiwa (56,75 persen) dan yang tinggal di daerah perkotaan sebesar 5,14 juta jiwa (43,25 persen).

Sampai dengan tahun 1996, jumlah penduduk miskin Sumatera Utara masih terlihat menurun. Hal ini menggambarkan bahwa pembangunan di Sumatera Utara menghasilkan peningkatan taraf hidup masyarakat Sumatera Utara secara keseluruhan. Jumlah penduduk miskin tahun 1993 sebesar 1,33 juta orang atau sebesar 12,31 persen dari total seluruh penduduk Sumatera Utara. Tahun 1996 jumlah penduduk Sumatera Utara yang tergolong miskin hanya 1,23 juta jiwa dengan persentase sebesar 10,92 persen. Namun karena terjadinya krisis moneter, penduduk miskin di Sumatera Utara tahun 1999 meningkat menjadi 16,74 persen dari total penduduk Sumatera Utara yaitu sebanyak 1,97 juta jiwa. Pada tahun 2002 terjadi penurunan penduduk miskin baik secara absolut maupun secara persentase, yaitu menjadi 1,88 juta jiwa atau sekitar 15,84 persen, sedangkan tahun 2003 tidak terjadi perubahan yang berarti dimana penduduk miskin menjadi sebanyak 1,88 juta jiwa atau sekitar 15,89 persen, sedangkan tahun 2004 jumlah dan persentase turun menjadi sebanyak 1,80 juta jiwa atau sekitar 14,93 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Sumatera Utara setiap tahunnya berfluktuasi. Pada tahun 2000, TPAK di daerah ini sebesar 57,34 persen, tahun 2002 naik menjadi 69,45 persen dan tahun 2003 menjadi 60,57 persen, dan tahun 2004 menjadi 68,95 persen.

Angkatan kerja di Sumatera Utara sebagian besar masih berpendidikan SD ke bawah. Persentase angkatan kerja golongan ini mencapai 43,41 persen, angkatan kerja yang berpendidikan setingkat SMTP dan SMTA masing-masing sekitar 24,36 persen dan 27,73 persen sedangkan sisanya 4,49 persen berpendidikan di atas SMTA. Dengan masih rendahnya pendidikan angkatan kerja kemungkinan produktivitasnya juga masih belum optimal.

Jika dilihat dari status pekerjaannya, sepertiga (33,23 persen) penduduk yang bekerja di Sumatera Utara adalah buruh atau karyawan. Penduduk yang berusaha dengan dibantu anggota keluarga mencapai sekitar 20,47 persen, sedangkan penduduk yang bekerja sebagai pekerja keluarga mencapai 21,51 persen. Hanya 2,85 persen penduduk Sumatera Utara yang menjadi pengusaha yang mempekerjakan buruh tetap/bukan anggota keluarganya.

Jumlah penduduk Sumatera Utara yang merupakan angkatan kerja adalah sebanyak 5,51 juta jiwa yang terdiri dari 4,76 juta jiwa masuk dalam kategori bekerja dan sebesar 758 ribu jiwa masuk dalam kategori mencari kerja dan tidak bekerja (pengangguran terbuka). Penduduk Sumatera Utara yang bekerja ini, sebagian besar bekerja pada sektor pertanian yaitu 51,60 persen. Sektor kedua terbesar dalam menyerap tenaga kerja di Sumatera Utara adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yaitu sebesar 17,18 persen. Sektor lain yang cukup besar peranannya dalam menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa-jasa, baik jasa perorangan, jasa perusahaan, dan jasa pemerintahan yaitu sebesar 10,78 persen, sementara penduduk yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 8,07 persen saja.

3.3. Potensi Wilayah

Propinsi Sumatera Utara merupakan propinsi terbesar di Pulau Sumatera baik ditinjau dari segi jumlah penduduk maupun nilai PDRB. Nilai PDRB Propinsi Sumatera Utara Atas Dasar harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2004 sebesar Rp. 118.100.511,43 milyar. Sektor Industri merupakan kontributor utama dengan peranan mencapai 25,36 persen. Selanjutnya diikuti oleh Sektor Pertanian (24,47 persen) dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (18,51 persen). Sementara sektor-sektor lain hanya memberikan total kontribusi sebesar 31,66 persen terhadap perekonomian di Sumatera Utara.

3.3.1. Potensi Pertanian

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Propinsi Sumatera Utara sangatlah penting, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Penduduk yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian mencapai 54,19 persen. Di daerah perdesaan angka ini lebih tinggi lagi yaitu mencapai 78,20 persen. Selain itu, pertanian juga merupakan sektor terbesar kedua penyumbang nilai tambah di Propinsi Sumatera Utara.

Sejak 1999-2002, sektor pertanian menjadi *leading sector* di Sumatera Utara. Besarnya kontribusi sektor pertanian tidak lepas dari pergerakan yang ditimbulkan oleh sub sektor tanaman bahan makanan dan perkebunan yang merupakan urat nadi sektor pertanian di Sumatera Utara. Pada tahun 2004, kontribusi sektor pertanian

terhadap PDRB Sumatera Utara sebesar 24,47 persen, lebih rendah dari tahun 2003 yang sebesar 24,94 persen.

Tabel 3.1
 Nilai PDRB Sektor Pertanian di Sumatera Utara menurut Sub Sektor
 Tahun 2000-2004 (Milyar Rupiah)

Sub Sektor	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanaman Bahan Makanan	7.022,15 (37,03)	8.046,05 (37,64)	8.987,42 (37,20)	9.457,46 (36,67)	10.066,47 (34,84)
Perkebunan	6.815,38 (35,94)	7.433,36 (34,77)	8.674,62 (35,91)	9.383,96 (36,39)	11.652,71 (40,33)
Pternakan	1.994,80 (10,52)	2.211,57 (10,34)	2.551,17 (10,56)	2.749,37 (10,66)	2.835,74 (9,81)
Perikanan	2.190,12 (11,55)	2.578,96 (12,06)	2.702,61 (11,19)	2.762,67 (10,71)	2.840,72 (9,83)
Kehutanan & Perburuan	940,86 (4,96)	1.108,59 (5,19)	1.240,88 (5,14)	1.436,03 (5,57)	1.497,91 (5,18)
Pertanian	18.963,32 (100,00)	21.378,53 (100,00)	24.156,70 (100,00)	25.789,49 (100,00)	28.893,55 (100,00)

Catatan : Angka dalam tanda () merupakan persentase kontribusi terhadap Sektor Pertanian
 Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

3.3.1.1. Tanaman Bahan Makanan

Dengan peranan sebesar 34,84 persen pada tahun 2004, tanaman bahan makanan memegang peranan yang penting bagi pembangunan sektor pertanian dalam upaya memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk. Penyediaan pangan yang cukup, distribusi yang merata, dan tingkat harga yang layak merupakan kondisi yang perlu diciptakan guna tercapainya stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam upaya pencapaian hal tersebut, pemerintah terus berusaha meningkatkan penyediaan pangan dengan terus melanjutkan pembangunan di sektor pertanian, terutama sub sektor

tanaman bahan makanan. Upaya yang dilakukan pemerintah antara lain berupa usaha intensifikasi serta pembinaan terhadap pemasaran bahan-bahan pertanian yang diselenggarakan secara terpadu dan menyeluruh, terutama di daerah perdesaan.

Masalah padi/beras masih merupakan masalah yang cukup rawan, sebab tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, namun bisa dikaitkan dengan masalah sosial dan masalah stabilitas. Produksi beras yang tidak tertampung pemerintah tentunya sangat merugikan petani, sebaliknya kekurangan beras mengakibatkan masalah nasional. Oleh karena itu penanganan masalah padi/beras itu cukup spesifik dan pelik.

Tabel 3.2
Luas Panen dan Produksi Padi Sumatera Utara Tahun 2000-2004

Tahun	Luas Panen (Ha)	Rata-rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
(1)	(2)	(3)	(4)
2000	847.610	41,46	3.514.253
2001	801.948	41,04	3.291.515
2002	765.161	41,21	3.153.305
2003	825.188	41,24	3.403.075
2004	826.091	41,39	3.418.782

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Setelah terus mengalami penurunan pada tahun 2000-2002, produksi padi Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan di tahun 2003 dan 2004. Pada tahun 2004 produksi padi Sumatera Utara mencapai 3,42 juta ton, atau meningkat sekitar 0,46 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan produksi padi tersebut diakibatkan oleh meningkatnya luas panen dan produktivitas lahan, dimana luas panen mengalami

peningkatan sebesar 0,11 persen, dari 825 ribu Ha menjadi 826 ribu Ha, sedangkan produktivitas lahan meningkat dari 41,24 menjadi 41,39 Kw/Ha. Secara umum produksi tanaman bahan makanan (khususnya padi) pada tahun 2004 lebih baik daripada tahun sebelumnya, merkipun belum seperti kondisi tahun 1998.

Jika dirinci menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Deli Serdang dan Simalungun merupakan pusat produksi padi di Sumatera Utara. Pada tahun 2004 produksi padi Kabupaten Deli Serdang mencapai 641.143 ton atau sebesar 18,75 persen dari total produksi padi Sumatera Utara. Sementara produksi padi Kabupaten Simalungun pada tahun yang sama mencapai 513.685 ton atau 15,02 persen dari total produksi padi Sumatera Utara.

Selain padi, tanaman palawija di Sumatera Utara juga cukup potensial. Hasil tanaman palawija menjadi salah satu andalan ekspor Sumatera Utara terutama ke Negara Singapura dan Malaysia. Selama tahun 2004 hampir seluruh komoditi palawija mengalami peningkatan produksi, kecuali ubi jalar.

Produksi ubi jalar tahun 2004 turun sebesar 13,97 persen, dari 136 ribu ton tahun 2003 menjadi 117 ribu ton tahun 2004, karena berkurangnya luas panen.

Produksi jagung di Sumatera Utara meningkat sebesar 3,78 persen, dari 687 ribu ton tahun 2003 menjadi 713 ribu ton tahun 2004 dengan luas lahan panen sebesar 210.782 Ha pada tahun 2003 dan 214.885 Ha pada tahun 2004. Kabupaten/Kota yang menjadi andalan produsen jagung di Sumatera Utara adalah Kabupaten Karo, dengan produksi sebesar 206 ribu ton pada tahun 2004 dan luas panen 62.267 Ha.

Terus meningkatnya produksi jagung merupakan gambaran yang cukup baik setelah dilaksanakannya program Gema Palagung selama periode 1996-2000 dimana Sumatera Utara menjadi salah satu daerah proyek tersebut. Peningkatan juga terjadi pada produksi ubi kayu dan kacang tanah. Produksi ubi kayu meningkat sebesar 12,86 persen, sedangkan kacang tanah meningkat sebesar 16 persen.

Tabel 3.3
Produksi Beberapa Jenis Tanaman Bahan Makanan di Sumatera Utara
Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jagung	667	634	641	687	713
Ubi Kayu	480	508	442	412	465
Ubi Jalar	127	118	118	136	117
Kacang Tanah	24	22	23	25	29
Kacang Kedelai	13	11	10	10	12
Kacang Hijau	10	9	10	11	11
Buah-buahan	692	778	784	708	757
Sayur-sayuran	1.267	1.295	1.342	1.070	1.013

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Produksi kacang tanah, kacang kedelai dan kacang hijau di Sumatera Utara tahun 2004 masing-masing 29 ribu ton, 12 ribu ton dan 11 ribu ton. Kabupaten Simalungun, Tapanuli Utara dan Dairi merupakan penghasil kacang tanah terbesar di Sumatera Utara, daerah penghasil kacang kedelai dan kacang hijau terbesar adalah Kabupaten Deli Serdang.

Produksi kacang kedelai, yang merupakan bahan baku industri makanan, mengalami kenaikan yang cukup berarti, jika melihat apa yang terjadi dalam lima tahun sebelumnya, dimana produksi kedelai di Sumatera Utara terus mengalami

penurunan, dari sekitar 45 ribu ton tahun 1998 menjadi 10 ribu ton tahun 2003, atau secara rata-rata telah terjadi penurunan sebesar 30,81 persen per tahun akibat dari berkurangnya lahan panen, dari sekitar 45 ribu Ha tahun 1998 menjadi hanya seluas 10 ribu Ha tahun 2003.

Sementara itu, produksi kacang hijau setelah meningkat menjadi sekitar 11 ribu ton pada tahun 2003 dan tetap stabil 11 ribu ton pada tahun 2004. Meskipun tidak mengalami kenaikan, hal ini merupakan indikasi cukup baik, karena sejak terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 produksi kacang hijau terus mengalami penurunan.

Produksi komoditi hortikultura buah-buahan naik sekitar 6,92 persen, dari 708 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 757 ribu ton pada tahun 2004. Sebaliknya terjadi pada sayur-sayuran, dimana produksinya turun sekitar 5,33 persen, dari 1.070 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 1.013 ribu ton pada tahun 2004.

3.3.1.2. Perkebunan

Sumatera Utara merupakan salah satu pusat perkebunan di Indonesia. Perkebunan di Sumatera Utara telah dibuka sejak penjajahan Belanda. Komoditi hasil perkebunan yang paling penting dari Sumatera Utara saat ini antara lain kelapa sawit, karet, kopi, coklat dan tembakau. Bahkan di Kota Bremen Jerman, tembakau Deli sangat terkenal.

Di Sumatera Utara terdapat tiga Perkebunan Besar BUMN dan ratusan perkebunan besar swasta. Sama seperti pada perkebunan rakyat, jenis tanaman

perkebunan besar yang ada di Sumatera Utara diantaranya kelapa sawit, karet, coklat, teh, tembakau, dan tebu.

Ditinjau berdasarkan sub sektor, maka perkebunan merupakan penyumbang terbesar dalam sektor pertanian. Pada tahun 2004, sub sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 40,33 persen, lebih tinggi dari pada tahun 2003 yang sebesar 37,40 persen.

Pada tahun 2004, hampir semua komoditi perkebunan rakyat di Sumatera Utara mengalami penurunan, kecuali kelapa sawit, kopi dan kemiri. Produksi kelapa sawit terus meningkat dari 1.701 ribu ton pada tahun 1999 menjadi sekitar 3.205 ribu ton tahun 2004. Produksi kopi, meningkat dari 22 ribu ton pada tahun 1999 menjadi sekitar 47 ribu ton tahun 2002, mengalami penurunan menjadi 43 ribu ton pada tahun 2003 dan kembali mengalami kenaikan produksi pada tahun 2004 menjadi 44 ribu ton. Produksi kemiri juga menunjukkan trend yang meningkat, yaitu dari 8 ribu ton tahun 2000 menjadi 19 ton tahun 2004.

Produksi karet rakyat dan kelapa, selama tiga tahun terakhir terus mengalami penurunan, masing-masing dari 234 ribu ton pada tahun 2002 menjadi 224 ribu ton pada tahun 2004 untuk tanaman karet dan dari 115 ribu ton pada tahun 2002 menjadi 87 ribu ton pada tahun 2004 untuk tanaman kelapa.

Pada tahun 2004, luas tanaman karet rakyat di Sumatera Utara turun 7,05 persen dibandingkan tahun 2003. Kabupaten Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, dan Mandailing Natal merupakan pusat perkebunan karet rakyat di Sumatera Utara. Di

ketiga daerah tersebut terbentang seluas 170.362 Ha kebun karet, atau sama dengan 55,92 persen dari total luas kebun karet rakyat Sumatera Utara.

Tabel 3.4
Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Rakyat di Sumatera Utara
Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karet	233	235	234	229	224
Kelapa Sawit	2.027	2.213	2.465	2.596	3.205
Kopi	38	43	47	43	44
Kelapa	113	115	115	110	87
Coklat	17	20	20	21	21
Kemenyan	1	5	6	6	6
Kemiri	8	10	20	18	19
Tebu	1	3	8	5	4
Jahe	14	15	4	4	3

Sumber : Dinas Perkebunan Prop. SU dalam SUDA-2004 BPS Propinsi Sumatera Utara

Tanaman coklat, walaupun produksinya tidak terlalu besar namun perkembangan produksinya konsisten tiap tahun. Pada tahun 1999 jumlah produksi mencapai sekitar 16 ribu ton dan pada tahun 2004 mencapai 21 ribu ton. Hal ini perlu mendapat perhatian, terutama oleh pemerintah daerah Asahan, Simalungun, dan Deli Serdang sebagai penghasil utama.

Kemenyan, yang merupakan salah satu tanaman ciri khas Sumatera Utara terutama untuk daerah pantai barat, produksinya stabil berkisar pada 6 ribu ton. Hasil produksi tanaman ini mempunyai pengaruh cukup besar terhadap pendapatan petani di Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah.

Jahe yang merupakan komoditi yang gemar di tanam terutama di daerah perbukitan, mengalami penurunan produksi. Pada tahun 2001 produksi jahe Sumatera Utara mencapai sekitar 15 ribu ton, tetapi pada tahun 2002 dan 2003 turun menjadi 4 ribu ton, atau turun sekitar 73,33 persen. Tahun 2004, kembali mengalami penurunan produksi menjadi 3 ribu ton, atau turun 25,00 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 3.5
Produksi Beberapa Komoditi Perkebunan Besar Milik Pemerintah
di Sumatera Utara Tahun 2000-2004 (Ribuan Ton)

Jenis Tanaman	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Karet	37	39	41	41	40
Kelapa Sawit (TBS)	3.719	3.650	3.626	3.780	4.030
Kelapa Sawit (CPO)	779	772	772	807	862
Inti Sawit	188	185	184	191	187
Teh	78	77	78	74	73
Coklat	21	17	14	16	18
Tebu (SHS)	32	46	28	25	25
Tembakau	1	1	1	1	1

Sumber : Kantor Inspeksi PTPN Wilayah I dalam SUDA-2004 BPS Propinsi Sumatera Utara

Produksi karet hasil perkebunan yang dikelola oleh pemerintah, pada tahun 2004 mencapai sekitar 40 ribu ton, lebih kecil dibanding tahun 2003 yang mencapai sekitar 41 ribu ton.

Tanaman kelapa sawit yang menjadi primadona perkebunan di Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan produksi, khususnya yang dikelola pemerintah. Produksi kelapa sawit, baik Tandan Buah Segar (TBS), *Crude Palm Oil* (CPO), maupun inti sawit, sebesar 4.620 ribu ton pada tahun 1999. Produksi tersebut terus meningkat sampai sekitar 5.079 ribu ton pada tahun 2004.

Salah satu komoditi strategis lainnya yang dikelola pemerintah yaitu tebu, pada tahun 2004 produksinya mencapai 25 ribu ton, sama seperti tahun sebelumnya. Jumlah produksi ini jauh menurun bila dibandingkan dengan tahun 2001 yang mencapai 46 ribu ton.

Selain itu, penurunan juga terjadi pada produksi komoditi teh, dimana pada tahun 2004 hanya menghasilkan 73 ribu ton, lebih rendah dibanding tahun 2002 yang mencapai 74 ribu ton.

Tanaman tembakau yang menjadi andalan dan primadona perkebunan Sumatera Utara sebelum tahun 1980-an, produksinya saat ini tidak terlalu besar. Produksi Tembakau Sumatera Utara setiap tahunnya hampir stabil. Hasil perkebunan milik pemerintah ini sebenarnya memiliki daya jual yang cukup tinggi namun produksinya saat ini hanya sekitar seribu ton per tahun.

3.3.1.3. Peternakan

Selama periode 2000-2004, perkembangan populasi berbagai jenis ternak dan unggas umumnya menunjukkan peningkatan yang cukup besar, setelah terjadi penurunan yang sangat drastis ketika krisis ekonomi melanda pada tahun 1998. Populasi ternak besar di Sumatera Utara tahun 2004, masing-masing sebanyak 6.777 ekor sapi perah, 248.971 ekor sapi potong, 263.435 ekor kerbau, dan 5.681 ekor kuda.

Seluruh populasi ternak besar yang ada di Sumatera Utara mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2004 jumlah sapi perah naik 3,07 persen, sapi potong naik 0,12 persen, kerbau naik 0,65 persen, dan kuda naik 0,23 persen.

Ternak kecil di Sumatera Utara, populasinya mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Pada tahun 2000 populasi babi hanya sebanyak 787.223, pada tahun 2003 tumbuh menjadi 849.240 ekor dan pada tahun 2004 populasinya mencapai 870.980 ekor atau bertambah sekitar 2,56 persen dari tahun sebelumnya. Populasi kambing dan domba masing-masing sebanyak 717.196 ekor dan 250.935 ekor atau masing-masing meningkat sebesar 0,65 persen dan 7,98 persen.

Perkembangan populasi ternak unggas tahun 2004 kurang menggembirakan, dimana populasi ayam petelur dan ayam pedaging mengalami penurunan masing-masing sebesar 4,22 persen dan 3,71 persen. Sedangkan populasi ayam kampung dan itik mengalami sedikit kenaikan masing-masing sebesar 0,04 persen dan 0,60 persen.

Tabel 3.6
Populasi Ternak Besar, Kecil, dan Unggas di Sumatera Utara
Tahun 2000-2004 (Ekor)

Jenis Ternak	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sapi Perah	6.420	6.445	6.510	6.575	6.777
Sapi Potong	247.781	248.078	248.375	248.673	248.971
Kerbau	260.049	259.138	260.044	261.734	263.435
Kuda	5.629	5.642	5.655	5.668	5.681
Kambing	698.851	703.393	707.965	712.566	717.196
Domba	184.583	199.312	215.217	232.391	250.935
Babi	787.223	807.375	828.043	849.240	870.980
Ayam Petelur	16.863.436	13.825.929	14.128.403	14.436.402	13.826.970
Ayam Kampung	20.532.960	21.361.054	22.222.545	23.118.780	23.128.148
Ayam Pedaging	26.893.165	27.565.494	38.806.173	39.512.296	38.045.260
Itik	2.223.951	2.237.295	2.250.717	2.264.221	2.277.806

Sumber : Dinas Peternakan Prop. SU dalam SUDA-2004 BPS Propinsi Sumatera Utara

3.3.1.4. Perikanan

Sumatera Utara memiliki potensi yang besar pada sub sektor perikanan, baik perikanan darat maupun perikanan laut. Pada perikanan laut, Sumatera Utara memiliki laut yang luas, baik pada pantai timur maupun pada pantai barat. Pada perikanan darat, Sumatera Utara memiliki Danau Toba yang dapat dikembangkan menjadi sentra perikanan darat Sumatera Utara.

Selama periode 2000-2003, pertumbuhan sub sektor perikanan cukup menggembirakan, tetapi pada tahun 2004 produksi ikan mengalami penurunan dari seluruh asal tangkapan. Dari hasil budidaya ikan, perairan umum dan perikanan laut masing-masing menurun sebesar 20,73 persen, 6,01 persen dan 5,63 persen.

Tabel 3.7
Produksi Ikan Sumatera Utara Menurut Asal Tangkapan
Tahun 2000-2004 (Ton)

Asal Tangkapan Ikan	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Budidaya Ikan	35.978	37.583	43.960	50.447	39.991
Perairan Umum	6.876	7.039	11.645	11.490	10.800
Perikanan Laut	338.215	341.326	345.192	341.183	321.989
Jumlah	381.069	385.948	400.797	403.120	372.780

Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. SU dalam SUDA-2004 BPS Propinsi Sumatera Utara

3.3.2. Perdagangan Luar Negeri

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2004 dibandingkan dengan tahun sebelumnya ternyata juga diikuti dengan naiknya surplus perdagangan luar negeri Sumatera Utara. Pada tahun 2004, surplus perdagangan luar

negeri Sumatera Utara tercatat sebesar 3, 29 milyar US\$ lebih tinggi dari pada tahun 2003 yang sebesar 2,01 milyar US\$ atau mengalami kenaikan sebesar 63,68 persen.

3.3.2.1. Ekspor

Pada tahun 2004 volume ekspor Sumatera Utara mencapai 7,51 juta ton dan volume impor sebesar 3,22 juta ton. Hal ini berarti terjadi kenaikan 57,72 persen pada ekspor, dan 40,24 persen pada impor.

Tabel 3.8
Perdagangan Luar Negeri Sumatera Utara
Tahun 2000-2004

Tahun	Ekspor		Impor		Neraca (000 US\$)
	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (000 US\$)	Berat Bersih (Ton)	Nilai FOB (000 US\$)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	5.166.654	2.437.764	2.620.166	775.287	1.662.477
2001	5.492.341	2.294.796	2.830.242	860.758	1.434.038
2002	6.662.573	2.891.996	2.684.055	819.298	2.072.698
2003	5.490.113	2.687.877	2.343.112	697.811	2.008.066
2004	7.512.890	4.239.409	3.221.858	953.359	3.286.050

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2003 nilai ekspor Sumatera Utara mencapai 2, 69 milyar US\$, dan pada tahun 2004 menjadi 4,24 milyar US\$ atau terjadi kenaikan sebesar 57,62 persen. Jika dirinci menurut komoditi , ekspor Sumatera Utara pada tahun 2004 sebagian besar merupakan hasil industri yang mencapai 3,17 milyar US\$ atau sekitar 74,69 persen dan diikuti oleh hasil-hasil pertanian yang mencapai 1,03 milyar US\$

atau sekitar 24,30 persen, dan hasil dari sektor lainnya sebesar 43 juta US\$ atau sekitar 1,01 persen dari total ekspor.

Tabel 3.9
 Nilai Ekspor Sumatera Utara menurut Komoditi
 Tahun 2000-2004 (Juta US\$)

Komoditi	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(6)
1. PERTANIAN	551	666	600	687	1.030
a. Karet Alam	324	307	364	472	754
b. Kopi	88	68	78	73	99
c. Pertanian Lainnya	139	291	158	142	177
2. INDUSTRI	1.870	1.618	2.272	1.987	3.166
a. Lemak dan Minyak Nabati	676	568	1.121	973	1.591
b. Minyak dan Lemak Nabati- Hewani Olahan	54	37	38	33	128
c. Aluminium	212	6	163	149	264
d. Udang, Kerang dan Sejenisnya	139	159	145	126	132
e. Kayu Lapis	136	145	139	122	140
f. Perabotan	50	41	45	36	57
g. Kayu Olahan	120	110	104	90	116
h. Perlengkapan Garmen Bukan Tekstil	51	62	58	58	79
i. Industri Lainnya	432	490	459	400	659
3. LAINNYA	17	11	20	14	43
Jumlah	2.438	2.295	2.892	2.688	4.239

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Tingginya nilai ekspor hasil industri terutama disumbang oleh ekspor berupa lemak dan minyak nabati khususnya berupa minyak sawit dan CPO yang nilainya mencapai 1,59 milyar US\$, yang berarti 37,53 persen dari total ekspor Sumatera Utara. Produk industri lain yang cukup besar andilnya dalam ekspor Sumatera Utara adalah komoditi udang, kerang dan sejenisnya; kayu lapis; kayu olahan; dan

aluminium. Dari komoditi ekspor hasil pertanian yaitu karet alam yang nilainya mencapai 754 juta US\$. Hasil pertanian lain yang merupakan komoditi ekspor Sumatera Utara adalah kopi, coklat, buah dan kacang.

Tabel 3.10
 Nilai Ekspor Sumatera Utara menurut Negara Tujuan
 Tahun 2000-2004 (Ribu US\$)

Komoditi	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jepang	43.559	38.561	38.561	366.735	575.022
India	113.348	109.575	302.360	294.359	471.156
Belanda	118.120	150.508	267.071	172.939	393.198
Amerika Serikat	56.286	63.861	303.006	270.926	371.075
Cina	59.035	59.266	106.293	181.587	330.655
Yordania	35.066	27.201	16.782	22.660	178.961
Singapura	255.715	150.153	184.725	134.358	165.905
Malaysia	178.627	153.425	157.424	136.107	161.905
Pakistan	73.920	52.001	77.177	39.144	106.830
Italia	71.786	67.499	45.605	51.480	101.929
Lainnya	1.432.302	1.422.748	1.041.337	1.017.581	1.382.774
Jumlah	2.437.764	2.294.796	2.891.996	2.687.876	4.239.410

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

Jika dirinci menurut negara tujuan, sebagian besar tujuan ekspor Sumatera Utara pada tahun 2004 adalah Jepang, India, Belanda, Amerika Serikat dan Cina. Besarnya nilai ekspor ke masing-masing negara tersebut berturut turut adalah 575 juta US\$, 471 juta US\$, 393 juta US\$, 371 juta US\$ dan 331 juta US\$.

Pada tahun 2004, seluruh komoditi ekspor mengalami peningkatan nilai ekspor dan ke seluruh negara tujuan ekspor.

3.3.2.2. Impor

Sama halnya dengan ekspor, impor Sumatera Utara juga mengalami peningkatan pada tahun 2004. Nilai impor Sumatera Utara bernilai 953,36 US\$, mengalami kenaikan sebesar 40,24 persen dari tahun 2003.

Impor Sumatera Utara menurut kelompok barang ekonomi sebagian besar berupa bahan baku/penolong yang mencapai 2.473,69 juta US\$ (76,78 persen). Sedangkan yang berupa barang konsumsi sebesar 667,48 juta US\$ (20,72 persen) dan sisanya berupa barang modal.

Tabel 3.11
Nilai Impor Sumatera Utara menurut Kelompok Barang Ekonomi
Tahun 2000-2004 (Ribu US\$)

Kelompok Barang Ekonomi	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Barang Modal	154.162	229.283	265.061	136.897	162.588
2. Bahan Baku/Penolong	347.687	338.490	342.257	373.680	540.749
3. Barang konsumsi	273.438	292.985	211.979	169.235	250.023
Jumlah	775.287	860.758	819.298	679.811	953.359

Sumber : BPS Propinsi Sumatera Utara

3.4. Sarana dan Prasarana

3.4.1. Angkutan Darat

Jalan merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar dan mendorong kegiatan perekonomian. Makin meningkatnya usaha pembangunan menuntut pula peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalulintas barang dari satu daerah ke daerah lain.

Panjang jalan di seluruh Sumatera Utara pada tahun 2004 mencapai 33.561,78 km yang terbagi atas jalan negara 2.098,050 km, jalan propinsi 2.8752,500 km dan jalan kabupaten/kota 28.711,319 km.

Pada transportasi darat, tersedia dua jenis kendaraan utama, yaitu kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 2004 jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di Polda Sumatera Utara sebanyak 1.957.703 unit atau naik 17,58 persen dibandingkan tahun 2003, sebanyak 1.664.930 unit.

Perkembangan panjang jalan ternyata tidak seiring dengan perkembangan jumlah kendaraan. Hal ini terlihat dari rasio jumlah kendaraan terhadap panjang jalan sebesar 58,33 kendaraan/km. Keadaan ini perlu mendapat perhatian khusus, karena jalan merupakan urat nadi kelancaran lalu lintas yang perlu untuk pendistribusian barang dan jasa oleh sarana angkutan darat.

Tabel 3.12
Jumlah Kendaraan Bermotor yang Terdaftar dan Panjang Jalan
Tahun 2000-2004

Jenis Kendaraan (Unit)	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mobil Gerobak	123.307	128.985	135.838	144.233	154.420
Mobil Bus	25.679	26.035	26.566	27.106	27.621
Mobil Penumpang	159.741	169.741	180.521	192.596	207.614
Sepeda Motor	873.452	952.361	1.084.051	1.300.995	1.568.048
Jumlah ¹⁾	1.182.179	1.277.142	1.426.976	1.664.930	1.957.703
Panjang Jalan (Km) ²⁾	28.063	31.280	32.575	32.898	33.561
Rasio Jumlah Kendaraan terhadap Panjang Jalan	42,13	40,83	43,81	50,61	58,33

Sumber : 1) Polda Propinsi Sumatera Utara

2) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Sumatera Utara

3.4.2. Angkutan Laut

Letak Sumatera Utara yang sangat strategis pada jalur pelayaran internasional menjadikan angkutan laut sebagai sarana perhubungan yang penting. Jumlah penumpang antar negara yang datang pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 12,13 persen, dari 99.993 orang pada tahun 2003 menjadi 112.151 orang pada tahun 2004. Sebaliknya, jumlah penumpang yang berangkat mengalami penurunan sebesar 14,43 persen, yaitu dari 129.642 orang pada tahun 2003 menjadi 110.929 orang pada tahun 2004.

Jika dilihat dari transportasi barang melalui laut, selama tahun 2004 angkutan barang antar negara untuk kegiatan muat barang sebesar 5.937 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 7,79 persen dibandingkan tahun 2003 yang sebesar 5.508 ribu ton. Kegiatan bongkar barang antar negara mengalami penurunan sebesar 5,34 persen, yaitu dari 2.040 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 1.931 ribu ton pada tahun 2004.

Tabel 3.13
Lalu Lintas Laut Antar Negara pada Pelabuhan di Sumatera Utara
Tahun 2000-2004

Tahun	Jumlah Kapal	Penumpang (Orang)		Barang (Ribuan Ton)	
		Berangkat	Datang	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	5.412	140.974	130.491	5.426	2.725
2001	5.647	143.900	154.793	6.072	2.898
2002	6.131	148.871	168.423	6.429	4.955
2003	4.688	129.642	99.993	5.508	2.040
2004	4.701	110.929	112.151	5.937	1.931

Sumber : 1) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I

Sama halnya dengan angkutan laut antar negara, angkutan laut antar pulau di pelabuhan yang diusahakan juga mulai menunjukkan peningkatan. Kegiatan pengangkutan penumpang antar pulau mengalami kenaikan, baik yang datang maupun yang berangkat. Jumlah penumpang antar pulau yang datang mengalami kenaikan sebesar 5,23 persen, yaitu dari 278.925 orang pada tahun 2003 menjadi 293.526 orang pada tahun 2004. Jumlah penumpang yang berangkat mengalami penurunan sebesar 0,09 persen, yaitu dari 296.697 orang pada tahun 2003 menjadi 296.424 orang pada tahun 2004.

Tabel 3.13
Lalu Lintas Laut Antar Pulau pada Pelabuhan di Sumatera Utara
Tahun 2000-2004

Tahun	Jumlah Kapal	Penumpang (Orang)		Barang (Ribuan Ton)	
		Berangkat	Datang	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2000	6.315	646.293	550.861	1.783	7.046
2001	6.366	566.756	500.712	1.695	7.508
2002	6.321	623.377	464.610	1.946	8.143
2003	5.620	296.697	278.925	835	7.144
2004	6.207	296.424	293.526	1.063	8.498

Keterangan : Hanya untuk Pelabuhan yang Diusahakan
Sumber : 1) PT (Persero) Pelabuhan Indonesia I

Kegiatan bongkar-muat barang antar pulau di pelabuhan sama dengan kegiatan bongkar-muat barang antar negara. Kegiatan muat barang mengalami kenaikan sebesar 27,30 persen, yaitu dari 835 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 1.063 ribu ton pada tahun 2004. Kegiatan bongkar barang antar pulau juga mengalami

kenaikan sebesar 18,95 persen, yaitu dari 7.144 ribu ton pada tahun 2003 menjadi 8.498 ribu ton pada tahun 2004.

3.4.3. Angkutan Udara

Jasa angkutan udara sangat penting bagi perekonomian Sumatera Utara secara global. Dengan transportasi udara, hubungan dengan dunia luar khususnya internasional akan semakin cepat.

Setelah terus meningkat pada periode 2000-2002, jumlah penumpang dan barang internasional yang dilayani oleh Bandara Polonia mengalami penurunan pada tahun 2003, karena menurunnya minat wisatawan mancanegara datang ke Sumatera Utara. Selanjutnya pada tahun 2004 kembali mengalami peningkatan.

Tabel 3.14
Lalu Lintas Udara Internasional di Bandara Polonia
Tahun 2000-2004

Tahun	Pesawat		Penumpang (Orang)		Barang (Ribuan Ton)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	2.744	2.743	227.004	226.099	5.797	4.781
2001	3.397	3.347	248.475	257.159	6.572	5.180
2002	3.366	3.381	291.176	296.186	6.568	6.276
2003	2.971	2.968	294.657	287.693	5.840	5.690
2004	4.127	4.139	382.637	380.712	6.999	6.558

Keterangan : Barang termasuk Bagasi dan Pos

Sumber : Bandara Polonia, Medan

Pada tahun 2004, jumlah penumpang pada penerbangan internasional sebanyak 380.712 orang yang datang dan 382.637 orang yang berangkat. Jumlah

penumpang yang datang tersebut naik sebesar 32,33 persen dan yang berangkat naik sebesar 29,86 persen dibandingkan tahun 2003.

Sama halnya dengan pengangkutan penumpang, jumlah barang baik yang dibongkar maupun yang dimuat juga mengalami peningkatan. Jumlah barang yang dibongkar mengalami kenaikan sebesar 15,25 persen, yaitu dari 5.690 ton pada tahun 2003 menjadi 6.558 ton pada tahun 2004, dan jumlah barang yang dimuat mengalami kenaikan sebesar 19,85 persen, yaitu dari 5.840 ton tahun 2003 menjadi 6.999 ton pada tahun 2004.

Angkutan udara domestik, baik penumpang maupun barang yang dilayani Bandara Polonia terus meningkat sejak tahun 1999. Penumpang pada penerbangan domestik yang datang meningkat sebesar 42,41 persen, yaitu dari 1.056.888 orang pada tahun 2003 menjadi 1.505.082 orang pada tahun 2004. Sedangkan penumpang yang berangkat mengalami kenaikan sebesar 41,59, yaitu dari 1.065.908 orang pada tahun 2003 menjadi 1.509.224 orang pada tahun 2004, dan penumpang yang transit juga mengalami kenaikan sebesar 15,22 persen, yaitu dari 31.186 orang pada tahun 2003 menjadi 35.931 orang pada tahun 2004. Untuk kegiatan bongkar-muat barang, barang yang dibongkar pada penerbangan domestik mencapai 32.707 ton atau naik 27,15 persen, dan yang dimuat mencapai 25.467 ton atau naik sebesar 29,62 persen.

Keadaan di atas mencerminkan bahwa semakin banyak masyarakat yang memilih angkutan udara sebagai sarana transportasi. Disamping lebih cepat dan nyaman, harga tiket yang tidak terlalu mahal dan banyaknya alternatif armada

penerbangan ternyata mempengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi udara.

Tabel 3.15
Lalu Lintas Udara Domestik di Bandara Polonia
Tahun 2000-2004

Tahun	Pesawat		Penumpang (Orang)			Barang (Ton)	
	Berangkat	Datang	Berangkat	Datang	Transit	Muat	Bongkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2000	7.609	7.628	388.556	401.444	15.502	10.890	13.006
2001	8.231	8.294	494.442	459.810	20.706	12.339	16.506
2002	11.541	11.554	740.160	740.385	22.611	16.369	20.251
2003	15.199	15.221	1.065.908	1.056.888	31.186	19.648	25.724
2004	17.933	17.973	1.509.224	1.505.082	35.931	25.467	32.707

Keterangan : Barang termasuk Bagasi dan Pos

Sumber : Bandara Polonia, Medan

BAB IV. PERKEMBANGAN INDUSTRI

4.1. Umum

Sebagai penggerak utama dalam pembangunan perekonomian, pembangunan sektor industri di Indonesia diarahkan untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar, khususnya dalam memperluas kesempatan kerja, memperluas kesempatan berusaha, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pemeratakan pendapatan masyarakat, serta mempercepat pengentasan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan pembangunan industri secara bertahap dan berkesinambungan.

Tabel 4.1.
Laju Pertumbuhan PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
Atas dasar Harga Konstan 1993, Tahun 2000-2004

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pertanian	4.57	3.60	2.26	3.11	3.77
2. Pertambangan dan Penggalian	11.38	-6.47	7.49	4.38	-6.90
3. Industri Pengolahan	3.50	4.48	5.08	3.64	4.05
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	6.15	8.74	8.58	6.06	5.61
5. Bangunan	6.35	4.01	4.26	8.73	10.53
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.35	3.20	4.89	3.30	4.55
7. Pengangkutan dan Komunikasi	8.12	6.71	6.65	7.31	10.07
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	9.68	1.92	2.94	6.37	9.81
9. Jasa-jasa	3.17	2.26	3.21	7.99	6.22
PDRB	4.83	3.72	4.07	4.52	5.34

Sumatera Utara sebagai propinsi yang memiliki berbagai potensi pengembangan baik dari segi infrastruktur, potensi pasar, tenaga kerja dan

sumberdaya alam, telah mengalami pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi, terutama sektor industri.

Tabel 4.2.
 Persentase PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha
 Atas dasar Harga Konstan 1993, Tahun 2000-2004

Lapangan Usaha	2000	2001	2002	2003	2004
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Pertanian	29.68	30.67	30.23	28.25	27.78
2. Pertambangan dan Penggalian	1.75	1.60	1.65	1.55	1.50
3. Industri Pengolahan	26.89	26.51	26.33	27.50	27.36
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	0.93	1.01	1.22	1.38	1.42
5. Bangunan	4.17	4.22	4.19	4.27	4.62
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	19.41	18.92	19.01	19.06	18.87
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5.60	5.64	5.61	5.84	5.99
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	4.18	4.16	4.29	4.28	4.55
9. Jasa-jasa	7.39	7.27	7.47	7.86	7.90
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Bila dilihat keadaan setiap sektor selama tahun 2000-2004, ternyata sektor industri pengolahan masih merupakan sektor primadona yang memberikan sumbangan besar terhadap pembentukan PDRB Sumatera Utara, yaitu lebih besar dari 25 persen. Sementara laju pertumbuhan sektor industri pengolahan tersebut dalam kurun waktu yang sama terlihat fluktuatif. Pada tahun 1996 pertumbuhan sektor ini sekitar 9,25 persen, kemudian akibat krisis moneter, pada tahun 1997-1999 pertumbuhannya menjadi 3,77 persen, minus 16,56 persen dan minus 0,08 persen. Pada tahun 2000 berhasil tumbuh sebesar 3,50 persen dan tahun-tahun berikutnya tumbuh dengan trend yang terus meningkat.

Dalam skala nasional pengembangan sektor industri telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang besar dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim yang mendukung untuk berkembangnya sektor ekonomi lainnya. Dalam ruang lingkup yang lebih kecil (propinsi atau kabupaten/kota) pembangunan sektor industri ditujukan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah disamping juga demi kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian di atas maka topik yang menjadi perhatian pada penulisan ini adalah beberapa karakteristik penting industri besar dan sedang yang meliputi perkembangan sektor industri, jumlah tenaga kerja, output, input, nilai tambah, produktivitas dan efisiensi.

4.2. Perkembangan Jumlah Perusahaan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir jumlah perusahaan industri besar dan sedang tidak mengalami pertumbuhan yang berarti. Bila dibandingkan antar tahun selama kurun waktu tersebut, dapat dilihat pada tabel 4.3 bahwa jumlah perusahaan industri besar dan sedang berfluktuasi dimana jumlah tertinggi terjadi pada tahun 2000 yaitu sebanyak 984 perusahaan.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat pula bahwa secara umum pada tahun 2001 jumlah perusahaan seluruh klasifikasi mengalami penurunan, kecuali industri logam dasar. Persentase yang paling banyak berkurang adalah industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (klasifikasi 32) dan industri pengolahan lainnya (klasifikasi 39) yaitu masing-

masing 29,93 persen dan 14,29 persen atau berkurang 5 dan 2 perusahaan (dari 62 dan 14 perusahaan pada tahun 2000 menjadi 57 dan 12 perusahaan pada tahun 1997).

Tabel 4.3.
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	388	385	387	379	384
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	62	57	55	55	55
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	141	139	136	131	133
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	34	34	32	32	32
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	191	182	174	174	174
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	37	35	34	32	32
37 Industri logam dasar	13	14	16	13	13
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	104	101	91	86	87
39 Industri pengolahan lainnya	14	12	22	17	19
Industri Besar dan Sedang	984	959	947	919	929

*) Angka sementara

Bila dilihat menurut persentase terhadap total, jumlah perusahaan industri besar dan sedang selama periode tahun 2000 sampai tahun 2004 kelompok industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) merupakan industri terbanyak. Untuk tahun 2004 industri tersebut berjumlah 384 perusahaan atau 41,33 persen dari jumlah perusahaan yang terdapat di kelompok industri besar dan sedang. Jumlah perusahaan terbesar kedua adalah industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35), yaitu

sebesar 174 perusahaan atau sekitar 18,73 persen dari keseluruhan jumlah perusahaan.

Kelompok industri kayu dan barang-barang dari kayu (klasifikasi 33), industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya (klasifikasi 38) serta kelompok industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (klasifikasi 32) mengikuti dibelakangnya, dengan jumlah perusahaan masing-masing adalah 133 perusahaan, 87 perusahaan, dan 55 perusahaan. Besarnya persentase dari masing-masing kelompok tersebut secara berturut-turut adalah 14,32 persen, 9,36 persen dan 5,92 persen. Sementara itu kelompok industri yang lain memiliki jumlah perusahaan yang tidak begitu besar, yaitu antara 13 sampai 32 perusahaan dengan besarnya persentase berkisar antara 1,39 sampai 3,44 persen.

Tabel 4.4.
Perbandingan Banyaknya Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara dan Indonesia, Tahun 1996-2003

Tahun	Sumatera Utara	Indonesia	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1999	1007	22 070	4,56
2000	984	22 174	4,44
2001	959	21 396	4,48
2002	947	21 146	4,48
2003	919	21 126	4,35

Bila dibandingkan dengan Indonesia, maka penurunan jumlah perusahaan industri besar dan sedang Sumatera Utara tahun 2000 mencapai 2,28 persen, jauh lebih besar dibandingkan penurunan jumlah perusahaan industri besar dan sedang

Indonesia yang hanya mencapai 0,47 persen dari jumlah perusahaan industri besar dan sedang Indonesia tahun 1999.

4.3. Persebaran Jumlah Perusahaan

Jumlah perusahaan industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu lima tahun terakhir masih terkonsentrasi di Kabupaten Deli Serdang. Pada tahun 2004 jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Deli Serdang mencapai 31,32 persen dari jumlah perusahaan industri besar dan sedang yang ada di Propinsi Sumatera Utara.

Selain itu, jumlah perusahaan industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara juga banyak terdapat di Kota Medan (22,17 persen) dan Kabupaten Asahan (11,09 persen). Selanjutnya di Kabupaten Simalungun (5,92 persen), Kabupaten Labuhan Batu (5,27 persen), Kabupaten Langkat (4,95 persen), Kota Pematang Siantar (4,52 persen), Kota Binjai (3,65 persen) dan Kota Tanjung Balai (3,44 persen).

Jumlah perusahaan industri besar sedang yang paling sedikit terdapat di Kota Sibolga (1 perusahaan), sementara di Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat sama sekali tidak terdapat perusahaan industri besar dan sedang. Kabupaten Nias Selatan dan Kota Padang Sidempuan masih bergabung dengan kabupaten induk (Nias dan Tapanuli Selatan).

Tabel 4.5.
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Menurut Kabupaten Kota, Tahun 1996-2004

Kabupaten/Kota (1)	2000 (6)	2001 (7)	2002 (8)	2003 (9)	2004*) (10)
1 Nias	5	4	4	3	4
2 Mandailing Natal	2	1	8	3	3
3 Tapanuli Selatan	16	16	15	15	15
4 Tapanuli Tengah	11	12	13	12	12
5 Tapanuli Utara	0	0	0	0	0
6 Toba Samosir	14	14	14	15	15
7 Labuhan Batu	46	50	53	49	49
8 Asahan	104	105	103	103	103
9 Simalungun	49	55	56	55	55
10 Dairi	0	0	0	0	0
11 Karo	5	5	3	3	3
12 Deli Serdang	315	299	294	282	290
13 Langkat	40	39	37	45	46
14 Nias Selatan	0	0	0	0	0
15 Humbang H.	0	0	0	0	0
16 Pakpak Barat	0	0	0	0	0
71 Sibolga	1	1	1	1	1
72 Tanjung Balai	33	33	31	32	32
73 Pematang Siantar	47	40	41	42	42
74 Tebing Tinggi	20	20	20	19	19
75 Medan	242	231	220	206	206
76 Binjai	34	34	34	34	34
77 P. Sidempuan	0	0	0	0	0
Sumatera Utara	984	959	947	919	929

*) Angka sementara

4.4. Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri besar sedang tahun 2000 mencapai 165.138 orang, namun pada tahun 2001 menurun menjadi 158.108 orang atau berkurang 4,26 persen dan terus menurun menjadi 152 389 orang (3,91 persen) pada tahun 2003 namun pada tahun 2004 naik menjadi 152 907 orang (0,34 persen).

Dari tabel 4.6 dapat dilihat bahwa pada tahun 2004 industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) yang terbesar dalam hal jumlah perusahaan mampu menyerap tenaga kerja paling besar yaitu sebanyak 56.492 orang atau 36,94 persen dari seluruh tenaga kerja yang diserap oleh sektor industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara. Demikian pula industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35) yang mempunyai jumlah perusahaan paling banyak kedua mampu menyerap 39.392 orang atau 25,76 persen.

Tabel 4.6.
Banyaknya Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	61842	55081	58465	56281	56492
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	8271	5790	4144	5389	5393
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	28006	30930	29738	27897	27958
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	4266	4465	4234	4451	4457
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	39418	39544	41617	39290	39392
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	3057	3035	3086	3043	3055
37 Industri logam dasar	5423	5794	6319	5130	5244
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	14334	13025	8243	10338	10341
39 Industri pengolahan lainnya	521	444	2752	570	575
Industri Besar dan Sedang	165138	158108	158598	152389	152907

*) Angka sementara

4.5. Output

Pada tahun 2004 output industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) memberi sumbangan terbesar hingga 59,29 persen dari total output industri besar dan sedang, posisi kedua oleh industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang plastik (klasifikasi 35) sebesar 17,39 persen, sehingga 76,68 persen dari total output industri besar dan sedang disumbang oleh kedua klasifikasi industri tersebut.

Tabel 4.7.
Total Output Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 1996-2004 (Milyar Rupiah)

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	17597.86	38670.79	25753.47	23880.21	24312.74
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	216.45	203.16	385.49	178.50	331.67
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	1910.63	2162.35	2286.17	2298.46	2511.06
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	368.32	372.92	370.12	1737.93	1781.83
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	4570.00	4934.70	5959.32	6911.19	7132.55
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	464.53	508.87	633.02	738.12	795.32
37 Industri logam dasar	2936.32	3093.46	4144.33	2725.51	3280.91
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	1228.60	1116.65	1440.32	658.42	842.44
39 Industri pengolahan lainnya	10.86	10.19	27.40	15.59	20.15
Industri Besar dan Sedang	29303.57	51073.09	40999.64	39143.93	41008.67

*) Angka sementara

Dari tabel 4.7 terlihat bahwa dibandingkan tahun 2003, pada tahun 2004 terjadi pertumbuhan output dari kedua klasifikasi industri tersebut yaitu naik sebesar 1,81 persen untuk industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) serta 3,20 persen untuk industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35). Selain itu pertumbuhan juga terjadi pada seluruh klasifikasi industri sehingga menyebabkan pertumbuhan total nilai output industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara sebesar 4,76 persen.

Pada tahun 2003 dibandingkan tahun 2002 berkurangnya nilai output sebesar 4,53 persen, lebih kecil dari berkurangnya biaya input sebesar 8,78 persen.

4.6. Biaya Input

Seiring dengan bertambahnya nilai output ternyata di sisi biaya input juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2004 dibandingkan tahun 2003 bertambahnya nilai output sebesar 4,76 persen sama dengan bertambahnya biaya input sebesar 4,76 persen pula. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi yang sama antara tahun 2003 dan 2004.

Pada tahun 2001 biaya input meningkat dan mencapai puncaknya yakni sebesar 39 214,27 milyar rupiah. Selanjutnya dari tabel 7 dapat dilihat bahwa pada tahun 2002 dan 2003 biaya input mengalami penurunan masing-masing sebesar 23,06 persen dan 8,78 persen.

Kelompok industri yang mampu menekan biaya input pada tahun 2003 antara lain industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) sebesar 3,93 persen, industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (klasifikasi 32) sebesar 65,04 persen, industri logam dasar (klasifikasi 37) sebesar 60,44 persen, industri barang-barang dari logam , mesin dan perlengkapannya (klasifikasi 38) sebesar 65,54 persen dan industri pengolahan lainnya (klasifikasi 39) sebesar 47,92 persen.

Tabel 4.8.
Biaya Input Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004 (Milyar Rupiah)

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	13275.30	31794.26	19885.17	19104.17	19227.14
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	164.16	149.30	327.62	114.54	255.71
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	1233.68	1235.48	1181.10	1196.07	1275.15
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	267.13	280.54	286.93	394.93	429.33
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	3615.56	3546.80	4164.37	4876.33	4912.68
36 Industri barang-barang galian bukan logam , kecuali minyak bumi dan batubara	181.95	230.41	122.73	232.97	288.56
37 Industri logam dasar	2343.14	1308.64	2992.89	1183.83	1590.49
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	488.97	663.72	1195.53	411.93	586.87
39 Industri pengolahan lainnya	5.32	5.12	15.42	8.03	10.22
Industri Besar Sedang	21575.21	39214.27	30171.76	27522.80	28576.15

*) Angka sementara

Sebaliknya beberapa kelompok industri mengalami peningkatan biaya input yaitu terjadi pada industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu (klasifikasi 33), industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan (klasifikasi 34), industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35) dan industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara (klasifikasi 36) masing-masing sebesar 1,27 persen; 37,3 persen; 17,10 persen dan 89, 82 persen.

4.7. Nilai Tambah

Selama tahun 2000 sampai tahun 2004, kelompok industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) merupakan penyumbang terbesar dalam menghasilkan nilai tambah di sektor industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara yaitu masing-masing sebesar 41,21 persen; 52,51 persen; 51,50 persen; 58,83 persen; 57,99 persen; 54,20 persen; 41,10 persen dan 40,90 persen.

Posisi kedua disumbangkan oleh kelompok industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35) yaitu sebesar 12,52 persen; 15,84 persen; 13,50 persen; 13,50 persen; 13,08 persen; 12,35 persen; 11,70 persen; 16,58 persen; 11,56 persen dan 17,85 persen.

Dibandingkan tahun 2003, nilai tambah pada tahun 2004 mengalami peningkatan sebesar 6,48 persen. Peningkatan terbesar terjadi pada industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik (klasifikasi 35) sebesar 65,29 persen, diikuti oleh industri pengolahan lainnya

(klasifikasi 39) sebesar 31,35 persen dan industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan (klasifikasi 34) sebesar 22,69 persen dan industri tekstil, pakaian jadi dan kulit (klasifikasi 32) sebesar 18,76 persen.

Tabel 4.9.
 Nilai Tambah Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
 Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004 (Milyar rupiah)

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	4322.56	6876.53	5868.30	4776.04	5085.60
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	52.29	53.86	57.87	63.96	75.96
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	676.95	926.87	1105.07	1102.39	1235.91
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	101.19	92.38	83.19	1343.00	1352.50
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	954.44	1387.90	1794.95	2034.84	2219.87
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	282.58	278.46	510.29	505.15	506.76
37 Industri logam dasar	593.18	1784.82	1151.44	1541.68	1690.42
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	739.63	452.93	244.79	246.49	255.57
39 Industri pengolahan lainnya	5.54	5.07	11.98	7.56	9.93
Industri Besar dan Sedang	7728.36	11858.82	10827.88	11621.11	12432.52

*) Angka sementara

4.8. Produktivitas

Salah satu faktor penentu yang dapat menghambat atau memacu peningkatan suatu usaha adalah produktivitas, dimana produktivitas yang tinggi merupakan faktor pendorong untuk mempercepat laju pertumbuhan.

Tabel 4.10.
Produktivitas Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004 (Juta Rupiah)

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	69.90	124.84	100.37	84.86	90.02
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	6.32	9.30	13.96	11.87	14.08
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	24.17	29.97	37.16	39.52	44.21
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	23.72	20.69	19.65	301.73	303.46
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	24.21	35.10	43.13	51.79	56.35
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	92.44	91.75	165.36	166.00	165.88
37 Industri logam dasar	109.38	308.05	182.22	300.52	322.35
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	51.60	34.77	29.70	23.84	24.71
39 Industri pengolahan lainnya	10.63	11.42	4.35	13.26	17.27
Industri Besar dan Sedang	46.80	75.00	68.27	76.26	81.31

*) Angka sementara

Produktivitas yang diukur dengan perbandingan nilai tambah per tenaga kerja dari tahun ke tahun dalam kurun waktu 2000-2004 secara total mengalami

peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2000 mencapai 69,90 juta rupiah dan puncaknya pada tahun 2001 mencapai 124,84 juta rupiah. Namun setelah itu, pada tahun 2002-2003 terjadi penurunan yang cukup besar yaitu menjadi 100,37 juta rupiah dan 84,86 juta rupiah atau turun 19,60 dan 15,45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2004 kembali mengalami peningkatan sebesar 6,08 persen, atau meningkat dari 84,86 juta rupiah tahun 2003 menjadi 90,02 juta rupiah pada tahun 2004.

Bila dilihat menurut klasifikasi industri, terlihat bahwa sejak tahun 2000-2004, produktivitas tertinggi dicapai oleh kelompok industri logam dasar (klasifikasi 37) dimana nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok klasifikasi lainnya, bahkan lebih tinggi dari rata-rata produktivitas industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara.

Selain kelompok industri logam dasar (klasifikasi 37) , kelompok industri lain yang produktivitasnya melebihi produktivitas total industri besar dan sedang adalah kelompok industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan (klasifikasi 34) dan industri makanan, minuman dan tembakau (klasifikasi 31) yaitu masing-masing sebesar 303,45 juta rupiah dan 90,02 juta rupiah dibandingkan total yang hanya mencapai 81,31 juta rupiah.

4.9. Efisiensi

Efisiensi suatu usaha merupakan perbandingan antara masukan yang digunakan (input) dengan keluaran yang dihasilkan (output). Semakin besar rasio ini

semakin tidak efisien jenis usaha tersebut atau sebaliknya semakin kecil rasio ini semakin efisien usaha tersebut.

Tabel 4.11.
Efisiensi Industri Besar dan Sedang Sumatera Utara
Berdasarkan Klasifikasi Industri, Tahun 2000-2004

Klasifikasi Industri	2000	2001	2002	2003	2004*)
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
31 Industri makanan, minuman dan tembakau	75.44	82.22	77.21	80.00	79.08
32 Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit	75.84	73.49	84.99	64.17	77.10
33 Industri kayu dan barang-barang dari kayu termasuk alat-alat rumah tangga kayu	64.57	57.14	51.66	52.04	50.78
34 Industri kertas dan barang-barang dari kertas, percetakan dan penerbitan	72.53	75.23	77.52	22.72	24.09
35 Industri kimia dan barang-barang dari kimia, minyak bumi, batubara, karet dan barang-barang dari plastik	79.12	71.87	69.88	70.56	68.88
36 Industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara	39.17	45.28	19.39	31.56	36.28
37 Industri logam dasar	79.80	42.30	72.22	43.44	48.48
38 Industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya	39.80	59.44	83.00	62.56	69.66
39 Industri pengolahan lainnya	48.99	50.25	56.28	51.51	50.72
Industri Besar dan Sedang	73.63	76.78	73.59	70.31	69.68

*) Angka sementara

Tingkat efisiensi industri besar dan sedang Propinsi Sumatera Utara tahun 2004 secara umum adalah 69,68 persen, artinya untuk memperoleh output (keluaran) sebesar 100 bagian diperlukan 69,68 bagian input (masukan).

Dari tabel 4.11 diperoleh gambaran bahwa selama periode 2000-2004 tingkat efisiensi mengalami penurunan dan peningkatan secara tak beraturan, yang berarti perusahaan industri belum cukup efisien, dimana nilai paling rendah dicapai pada tahun 2004 yaitu sebesar 69,68 persen dan tertinggi pada tahun 2001 yaitu sebesar 76,78 persen.

Berdasarkan klasifikasi industri, yang berhasil mencapai tingkat efisiensi paling rendah pada tahun 2000 adalah industri barang-barang dari logam, mesin dan perlengkapannya (klasifikasi 38) sebesar 39,80 persen; pada tahun 2001 adalah industri logam dasar sebesar 42,30 persen; pada tahun 2002 adalah industri barang-barang galian bukan logam, kecuali minyak bumi dan batubara (klasifikasi 36) sebesar 19,39 persen; pada tahun 2003 dan 2004 adalah industri kertas dan barang-barang dari kertas (klasifikasi 34) sebesar 22,72 persen dan 24,09 persen.

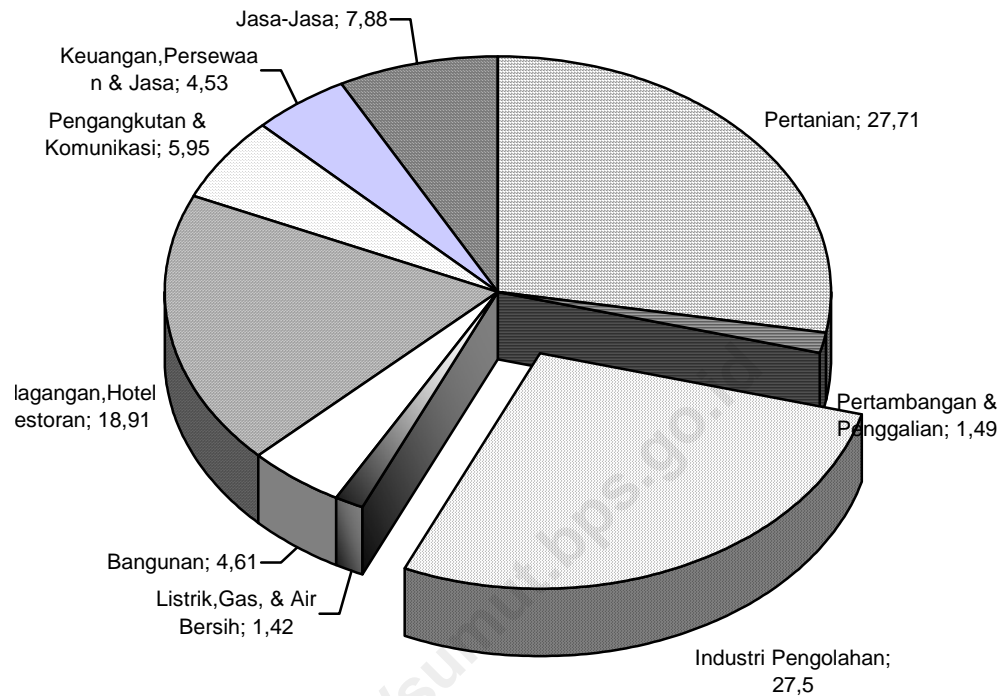
BAB V. PERMASALAHAN SEKTOR INDUSTRI

5.1. Peranan Industri Pengolahan Sumatera Utara

Perbaikan perekonomian nasional di berbagai sektor usaha masih merupakan prioritas kerja utama pemerintah sejak krisis moneter yang melanda bangsa Indonesia pertengahan tahun 1997. Struktur perekonomian Sumatera Utara sejak tahun 1994 telah bergeser dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri pengolahan.

Sektor industri pengolahan mendominasi perekonomian Sumatera Utara dari tahun 1994 sampai tahun 1998, namun dengan adanya krisis ekonomi memberi dampak yang buruk terhadap sektor industri pengolahan. Perkembangan peranan sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sejak tahun 1999 mengalami penurunan tiap tahun. Pada tahun 1999 sumbangan sektor industri pengolahan turun menjadi 27,13 persen, tahun 2000 sebesar 26,65 persen, tahun 2001 sebesar 26,51 persen, tahun 2002 sebesar 26,33 persen, dan tahun 2003 sebesar 27,50 persen. Keadaan yang berbeda terjadi di sektor pertanian, setelah krisis ekonomi sumbangan sektor pertanian meningkat hingga mampu menggeser posisi industri pengolahan dalam pembentukan struktur ekonomi Sumatera Utara. Pada tahun 2003 kontribusi sektor industri mulai meningkat peranannya sedikit dibawah sektor pertanian. Sektor industri merupakan sektor yang sangat potensi dikembangkan di Sumatera Utara untuk menggerakkan roda perekonomian karena sektor

Grafik: Persentase PDRB Sumatera Utara Menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku Tahun 2004

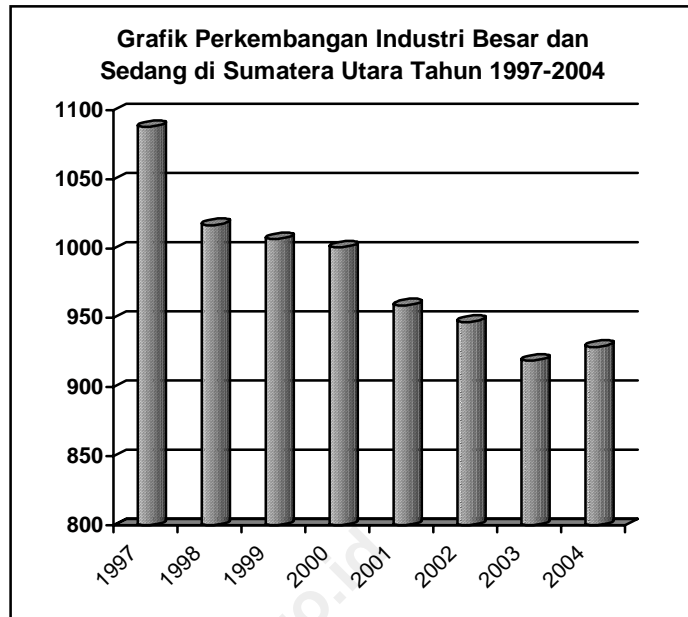


industri mampu menciptakan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja. Disamping itu sektor industri juga bisa membangkitkan sektor lain dalam pemenuhan bahan baku industri.

5.2. Permasalahan Sektor Industri

Pembangunan industri dalam Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) telah berhasil membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi Sumatera Utara terutama mendorong kearah terwujudnya struktur ekonomi yang seimbang antara sektor industri yang tangguh. Proses industrialisasi juga mampu mendorong berkembangnya industri sebagai motor penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja,

pendapatan devisa,
dan sekaligus
menunjang
pembangunan daerah
dan sektor lainnya.
Hasil pembangunan
yang dicapai sektor
industri tersebut
didukung oleh



beberapa faktor antara lain terciptanya stabilitas ekonomi makro yang mantap serta iklim investasi yang mampu merangsang pertumbuhan ekonomi, tersedianya prasarana ekonomi dan keuangan yang makin baik dan kemampuan dunia usaha yang makin meningkat dalam memanfaatkan peluang bisnis yang ada.

Namun dengan terjadinya krisis moneter pada pertengahan tahun 1997 memberi dampak yang buruk bagi sektor industri. Keadaan ini semakin parah seiring dengan suhu sosial politik nasional maupun regional yang memanas, aksi demonstrasi dan kerusuhan di berbagai daerah yang menyebabkan arus distribusi barang terganggu serta nilai tukar rupiah yang semakin melemah sehingga proses produksi dari berbagai jenis industri menurun bahkan tidak sedikit perusahaan menghentikan kegiatan usahanya/tutup.

Keadaan ini sangat disayangkan bila terus berlanjut karena keberadaan perusahaan industri terutama yang berskala besar dan sedang di Sumatera Utara sangat diharapkan untuk memberikan dampak yang cukup positif baik bagi penciptaan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja yang cukup banyak untuk mengurangi angka pengangguran, mendorong sektor hilir untuk menyediakan bahan baku lokal, meningkatkan ekspor non migas maupun dampak perekonomian positif lainnya. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2003 jumlah industri di Sumatera Utara terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Untuk merangsang minat pengusaha/investor pemerintah terutama pemerintah daerah perlu memikirkan cara untuk mengatasi permasalahan di sektor industri dan memberikan iklim berusaha yang kondusif di Sumatera Utara.

Propinsi Sumatera Utara sebagai suatu wilayah dengan luas 71.680 Km² dan jumlah penduduk sebanyak 12.123.360 jiwa dapat diperhitungkan sebagai pasar yang relatif luas dan besar bagi pemasaran hasil industri. Sumatera Utara juga merupakan sumber yang relatif potensi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan konsumsi industri. Keadaan dan pertumbuhan daerah di berbagai sektor/lapangan usaha merupakan kekuatan pendorong bagi pertumbuhan ekonomi dan potensi daerah yang memberikan peluang bagi pengembangan industri.

Keadaan perkembangan daerah yang berkaitan dengan pengembangan sektor industri dapat dilihat dalam berbagai aspek dan terutama yang

menyangkut dengan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan pendapatan perkapita.

Dilihat dari sumber daya alam, propinsi Sumatera Utara memiliki sumber daya alam yang relatif potensi dengan struktur tanah yang relatif cukup baik di daerah ini dalam pengembangan kegiatan pertanian terutama perkebunan. Selain potensi pertanian, Sumatera Utara juga memiliki potensi bahan galian dengan jenis yang beraneka ragam. Sebagian besar dari deposit yang diketahui belum dimanfaatkan dan dikelola. Hal ini memberikan peluang yang cukup baik bagi pengembangan industri bahan kimia dan bahan bangunan terutama yang berskala kecil dan menengah. Sumber alam lainnya yang cukup potensi adalah air terjun dan panas bumi sebagai sumber tenaga pembangkit listrik.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri di Sumatera Utara kebijakan dan strategi pengembangan sektor industri yang akan diterapkan hendaknya mampu menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam dunia usaha khususnya sektor industri. Permasalahan-permasalahan yang ada di sektor industri harus bisa diatasi agar para pengusaha/investor bergairah lagi menanamkan investasi di Sumatera Utara.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor industri pengolahan adalah :

1. Masalah Birokrasi

- a. Perizinan tidak transparan, berbelit-belit, diskriminatif, lama, dan terjadi tumpang tindih vertikal (antara pusat dan daerah) serta horisontal (antar instansi di daerah).

- b. Penegakkan dan pelaksanaan hukum dan berbagai peraturan perundang-undangan masih kurang serta cenderung kurang tegas.
- c. Administrasi perpajakan yang belum optimal. Pengusaha menganggap administrasi perpajakan terutama dalam kaitannya dengan restitusi produk-produk ekspor sangat tidak efisien.
- d. Banyaknya pungutan yang seringkali tidak disertai pelayanan yang memadai.

2. Masalah Teknologi

- a. Lemahnya penguasaan dan penerapan teknologi. Penerapan teknologi tepat guna belum banyak dimanfaatkan oleh industri untuk meningkatkan produksi.
- b. Tenaga kerja terampil sulit diperoleh dan dipertahankan karena kualitas sumber daya manusia relatif rendah.

3. Masalah Bahan Baku

- a. Suplai bahan baku kurang memadai antara lain karena kesulitan dalam memperoleh bahan baku di pasaran.
- b. Harga bahan baku terlalu tinggi terutama bahan baku yang berasal dari impor karena tergantung nilai kurs terhadap dollar.

4. Masalah Pemasaran

- a. Pemasaran hasil produksi agak sulit dan harganya rendah sehingga hasil penjualan tidak mampu menutupi biaya produksi yang cukup tinggi.

- b. Permintaan produk di pasaran sangat rendah walaupun harganya rendah karena kalah bersaing dengan perusahaan lain.
- c. Asosiasi pengusaha belum berperan dalam mengkoordinasikan produk sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat antar usaha sejenis.

5. Masalah Permodalan

- a. Sistem dan prosedur kredit dari lembaga keuangan dan nonbank rumit dan lama sehingga dalam pencairan kredit cukup lama.
- b. Suku bunga kredit perbankan cukup tinggi sehingga kredit menjadi mahal.

6. Masalah Manajemen

- a. Pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan belum bisa diterapkan karena pengetahuan dan managerial skill relatif rendah sehingga strategi bisnis yang tepat belum mampu disusun dengan baik.
- b. Kemampuan pengusaha mengorganisasikan diri dan karyawan masih lemah sehingga terjadi pembagian kerja yang tidak tepat.
- c. Produktivitas karyawan masih rendah sedangkan intensitas pelatihan yang dilaksanakan oleh industri belum juga menggembirakan.

7. Permasalahan Industri Kecil

- a. Sebagian besar industri kecil yang ada merupakan usaha sampingan atau pelengkap bagi pengusaha kecil dengan produksi yang berfluktuasi cukup besar atau berpola musiman atau tidak beraturan.

- b. Sikap dan reaksi pengusaha industri kecil yang pada umumnya lambat dan kurang tanggap mengikuti perkembangan sehubungan dengan latar belakang budaya agraris. Dalam hal ini pengusaha pada umumnya sering pasrah dalam menghadapi dampak perkembangan.
- c. Sulitnya menemukan peralatan produk yang sesuai dengan kebutuhan industri kecil dalam rangka peningkatan mutu dan pengembangan produk baru. Sementara pengusaha kecil pada umumnya tidak mempunyai kemampuan untuk mengembangkan sendiri peralatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi dan tingkat kapasitas produksinya.
- d. Volume permintaan atas hasil produksi industri kecil pada umumnya adalah relatif kecil dengan segmen pasar tradisional yang spesifik serta terbatas secara geografis. Sementara industri kecil dengan hasil produksi untuk pasar yang relatif luas pada umumnya dihadapkan dengan pesaing-pesaing yang kuat dari kelompok industri besar dan sedang.

Masalah-masalah sektor industri yang dikemukakan diatas dapat dilengkapi dengan berbagai bentuk masalah umum tingkat sektoral maupun tingkat regional sebagai berikut:

1. Struktur industri

Keterkaitan antara kelompok industri dan antar industri pada kelompok yang sama pada umumnya masih rendah. Hal ini dapat terlihat dari tingkat ketergantungan industri-industri terhadap komite impor dari luar daerah dalam

hal pengadaan bahan-bahan dan peralatan, demikian juga industri pendukung agroindustri dan aneka industri belum berkembang luas.

2. Keterkaitan antar sektor

Keterkaitan antar sektor industri dan sektor-sektor / lapangan usaha lainnya masih lemah dalam berbagai bidang terutama yang menyangkut dengan pengembangan teknologi, pengujian sertifikasi, transportasi, pengadaan bahan baku dan lain sebagainya yang menyangkut dengan produksi dan pemasaran.

3. Ekspor hasil industri

- Daya saing barang-barang hasil industri pada umumnya masih rendah di pasar regional dan khususnya di pasar internasional.
- Harga komoditi hasil pertanian olahan yang cenderung menurun di pasar internasional
- Persyaratan kualitas dan jangka waktu penyerahan barang yang relatif masih sulit terpenuhi dengan baik dan tepat.
- Jaringan pemasaran barang-barang hasil industri yang pada umumnya belum berkembang luas di tingkat regional dan internasional.
- Karakteristik barang-barang produksi lokal yang kurang beradaptasi dengan selera dan persyaratan mutu yang berlaku di daerah dan negara tujuan ekspor.

4. Sikap masyarakat konsumen

- Masyarakat Sumatera Utara umumnya masih bertahan dengan kebiasaan masyarakat agraris pedesaan dalam hal konsumsi bahan makanan pokok

yang tergolong segar dan kurang berminat dengan bahan makanan olahan ataupun kemasan industri.

- Masyarakat pedesaan dan terutama masyarakat kota pada umumnya cenderung lebih menyukai barang-barang baru yang berasal dari luar daerah dan luar negeri. Masyarakat semakin cenderung beralih dari barang-barang hasil industri lokal dan industri kecil yang tergolong tradisional ataupun yang bermutu rendah.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri di Sumatera Utara perlu diupayakan pengembangan industri yang tangguh dan maju dalam menghadapi dampak globalisasi, AFTA, APEC, dan persaingan dengan industri-industri dari negara industri baru di kawasan Asia Pasifik. Agroindustri juga perlu dikembangkan untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian dalam rangka memantapkan industrialisasi di Sumatera Utara, karena daerah Sumatera Utara sangat potensi dalam menghasilkan berbagai ragam/jenis komoditi pertanian yang meliputi hasil-hasil perkebunan, palawija, hortikultura, buah-buahan, hasil peternakan dan perikanan.

BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Peranan sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Sumatera Utara selalu menduduki posisi teratas dengan memberikan kontribusi terbesar sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1998, sedangkan pada tahun 1999-2004 sektor industri pengolahan menduduki posisi kedua dibawah sektor pertanian sebagai akibat adanya krisis moneter berkelanjutan yang melanda Indonesia. Namun demikian sektor industri mempunyai peranan yang utama sebagai penggerak peningkatan laju pertumbuhan ekonomi daerah di semua sektor terutama meningkatkan dukungan agroindustri terhadap sektor pertanian.

Sehubungan dengan adanya berbagai peluang yang dapat dimanfaatkan, maka pembangunan sektor industri di Sumatera Utara harus sejalan dengan pertumbuhan dan perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang yang berkaitan dengan perkembangan teknologi, kerjasama ekonomi regional dan internasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor industri.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sektor industri antara lain:

- ❖ Permasalahan birokrasi yang tidak transparan terutama yang berhubungan dengan perizinan, perpajakan dan penegakkan hukum.
- ❖ Penguasaan dan penerapan teknologi yang masih lemah.
- ❖ Ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah dan luar negeri.

- ❖ Pemasaran produk industri yang belum optimal sehingga daya saing di pasaran dalam negeri dan luar negeri masih rendah.
- ❖ Sarana dan prasarana pendukung sektor industri masih kurang.

6.2. Saran

Pembangunan sektor industri di propinsi Sumatera Utara diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Upaya pengembangan dan perluasan kegiatan industri termasuk agroindustri perlu ditingkatkan pembinaannya dan didorong melalui penciptaan iklim yang lebih merangsang bagi penanaman modal. Penyebaran pembangunan industri diberbagai daerah kabupaten/kota perlu diupayakan sesuai dengan potensi masing-masing daerah kabupaten/kota agar tertata dengan baik dan mendorong pemerataan, karena selama ini sektor industri terpusat di tiga daerah yaitu Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang dan Kabupaten asahan.

Untuk mendukung pengembangan industri diupayakan peningkatan sarana dan prasarana sehingga tercipta kondisi yang menarik dalam pengembangan kegiatan industri. Oleh karena itu usaha swasta didorong untuk ikut serta membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan cara:

- ❖ Meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor industri melalui penguasaan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia.
- ❖ Meningkatkan daya saing industri baik di pasaran dalam negeri maupun internasional.

- ❖ Meningkatkan peranan industri kecil dalam rangka keseimbangan dan pemerataan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan industri serta memperluas lapangan kerja.

<http://sumut.bps.go.id>